

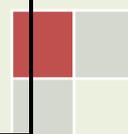


**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKIP)**

**DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat Kantor : Jl. Perwira No. 184 Kelurahan Belakang Balok Kota Bukittinggi.



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 yang dalam laporan ini disebutkan sebagai LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi 2020 merupakan suatu pertanggungjawaban formal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pengguna anggaran yang berkewajiban untuk menyampaikan laporan kinerjanya sesuai dengan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu unit kerja eselon II berkewajiban menyusun LKIP tahun 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan atas penggunaan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama tahun 2020.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja. Secara umum sasaran yang direncanakan tahun 2020 dapat dikatakan terealisasi dengan cukup baik.

LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2020 ini dapat tersusun karena adanya dukungan dari seluruh Bidang yang ada di Dinas P3APPKB dan SKPD terkait.

Akhir kata semoga LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2020 ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah kebijakan dan program serta kegiatan pada masa yang akan datang.

Bukittinggi, Februari 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi



TATI YASMARNI, SE MM  
NIP. 19630629 198302 2001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi tahun 2020 dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja tahun 2020 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas P3APPKB. Capaian kinerja ini menggunakan tolok ukur target kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020 yang merupakan komitmen penuh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi disusun untuk menggambarkan capaian kinerja sampai tahun 2020. Sebagai materi utama dalam penyusunan LKIP ini adalah **Rencana Strategis (Renstra)** yang memuat Tujuan dan Sasaran yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan, **Rencana Kerja (Renja)** tahun 2020 dan **Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)** Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi tahun 2020.

Analisis dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), ini digunakan untuk membuktikan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja (IK) Kepala Dinas yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Berikut adalah rincian dari Indikator Kinerja Utama (IK) yang telah dicapai :

Tabel 1.1  
Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Sumber Data
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persentase	56 %	60,51	108,05 %	
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang	Persentase	100%	100%	100%	

	mendapat Layanan Komprehensif.					
3	Indeks Kualitas Keluarga	Rasio	65,76	64,53	98,13%	
4	Tingkat Capaian Anugerah Prahita Eka Praya (APE)	Kategori	Utama	Utama	100%	
5	Tingkat Capaian Kota Layak Anak berdasarkan kategori.	Kategori	Madya	-	-	
6	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	Persentase	100%	100%	100%	
7	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Jumlah	65,6	68,08	103,78 %	
8	Age Spesific Fertility Rates (ASFR)	Jumlah	90	7,25	191,64 %	
	Total Fertility Rate (TFR)	Rasio	2,52	2,52	98.81%	

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan dan perbaikan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi kedepan, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik, sehubungan dengan hal tersebut pentingnya koordinasi dan sinergi antara berbagai unsur Instansi terkait ataupun mitra kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi .

Sebagai langkah nyata dari perbaikan berkelanjutan tersebut, pada tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi akan mempersiapkan SDM dan tata kelola Dinas untuk mendorong terwujudnya Visi dan Misi Walikota Bukittinggi yaitu ***Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya*** dengan memperhatikan kondisi keadilan dan kesetaraan Gender serta program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kota Bukittinggi.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....		i
Ikhtisar Eksekutif.....		iii
Daftar Isi .....		v
<b>Bab I</b>	<b>Pendahuluan</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang .....	1
	1.2 Data Umum SKPD.....	2
	1.3 Landasan Hukum .....	4
	1.4 Maksud dan Tujuan .....	5
	1.5 Sistematika Penulisan .....	5
	1.6 Tugas dan Wewenang Organisasi.....	6
	1.7 Susunan Organisasi.....	7
	1.8 Pegawai.....	8
<b>Bab II</b>	<b>Perencanaan Kinerja</b>	<b>11</b>
	2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2019 .....	11
	2.2 Tujuan dan Dan Sasaran .....	12
	2.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 .....	13
	2.4 Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019.....	14
<b>Bab III</b>	<b>Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>16</b>
	3.1 Metode Pengukuran Capaian Target Kinerja	16
	3.2 Hasil Pengukuran Kinerja .....	17
	3.3 Analisis Capaian Kinerja .....	18
	3.4 Akuntabilitas Keuangan .....	76
	3.5 Permasalahan dalam Pencapaian dan Rekomendasi Perbaikan	79
	3.6 Usulan dan Harapan.....	81
	3.7 Prestasi dan Penghargaan.....	82
<b>Bab IV</b>	<b>Penutup.....</b>	<b>88</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

**T**erselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan itu, dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Bukittinggi dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Bukittinggi adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* atas pelaksanaan tugas,

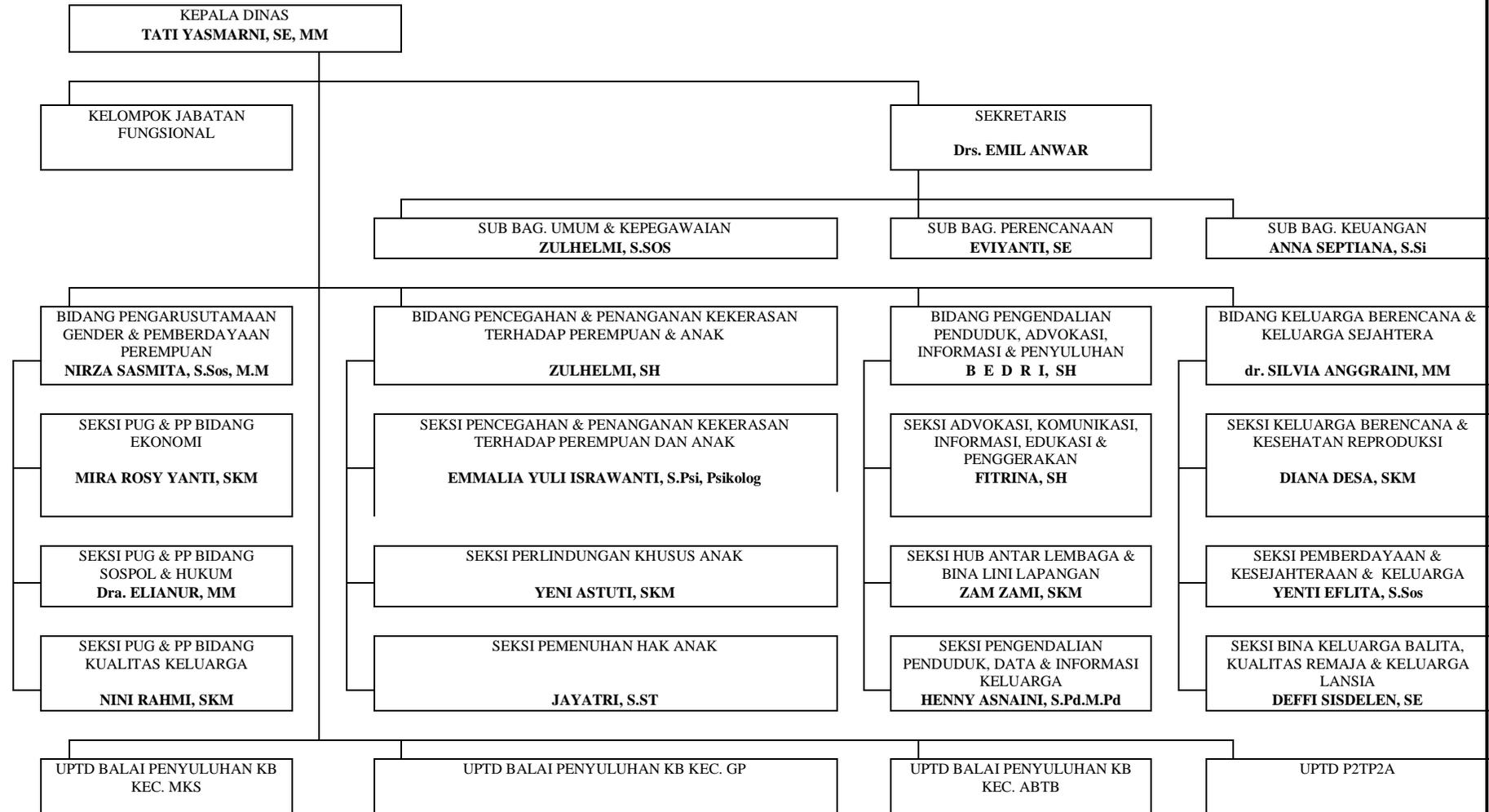
fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Bukittinggi

## **1.2 Data Umum SKPD**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam menjalankan kewenangan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinas P3APKB dipimpin oleh Kepala Dinas, Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas P3APKB memiliki 9 (sembilan) orang Penyuluh Keluarga Berencana, semua ASN berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang dan Pegawai Kontrak 14 (sepuluh) orang yang merupakan pegawai yang dipekerjakan di Dinas P3APKB.

**BAGAN STRUKTUR DINAS PPPAPKB**



### 1.3 Landasan Hukum

Penyusunan LKIP Tahun 2020 tidak terlepas dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi yang telah disusun sebelumnya, mengingat LKIP merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang tersusun dalam RENJA yang telah dilaksanakan selama satu tahun penuh.

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Berikut adalah landasan hukum dalam penyusunan LKIP Tahun 2020 :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka

menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui kebijakan dan program yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam APBD Kota Bukittinggi dan sumber dana lainnya (DAK Bidang KB) Tahun anggaran 2020 yang ditujukan kepada Walikota dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LKIP Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Tujuan LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2020 secara umum adalah untuk menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan, permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah yang dilakukan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada dasarnya adalah penyampaian dan pengkomunikasian capaian kinerja pada urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja. Ataupun menghasilkan ketidaksesuaian / kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) kinerja yang merupakan umpan balik (*Feed Back*) untuk perbaikan atas kekurangan

/kelemahan pada masa yang datang. Penyajian LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

### **DAFTAR ISI**

#### **Bab I : Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Data Umum SKPD
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan
- 1.6 Tugas dan Wewenang Organisasi
- 1.7 Susunan Organisasi
- 1.8 Pegawai

#### **Bab II : Perencanaan Kinerja**

- 1.1 Perencanaan Strategis 2020
- 1.2 Tujuan dan Sasaran
- 1.3 .Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

#### **Bab III : Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020**

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

#### **Bab IV : Penutup**

### **1.6 Tugas dan Wewenang Organisasi**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Bukittinggi adalah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam menjalankan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Pemberian dukungan Program atas urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Melaksanakan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
4. Melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi tugas di bidang PP/PA dan Pengendalian Penduduk serta KB/KS
5. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan dengan tugas dan fungsinya.

### **1.7 Susunan Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi ditetapkan dengan peraturan Daerah 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- Kepala Dinas : 1 (satu) Orang
- Sekretaris : 1 (satu) Orang
- Kepala Bidang : 4 (empat) orang
  - Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
  - Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
  - Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
  - Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Informasi dan Penyuluhan
- Kasubag : 3 (tiga) Orang
  - Kasubag Keuangan
  - Kasubag Perencanaan
  - Kasubag Umum dan Kepegawaian

- Kepala Seksi : 12 (dua belas) Orang yaitu:
  - Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan
  - Seksi Pemenuhan Hak Anak
  - Seksi Perlindungan Khusus Anak
  - Seksi PUG dan Bidang Ekonomi
  - Seksi PUG dan PP Bidang SosPol dan Hukum
  - Seksi PUG dan PP Bidang Kualitas Keluarga
  - Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
  - Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
  - Seksi Bina Keluarga Balita, Kualitas Remaja dan Keluarga Lansia
  - Seksi Advokasi, Informasi dan Penyuluhan
  - Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan
  - Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga
- Staf : 11 (sebelas) Orang

## 1.8 Pegawai

Jumlah sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi keadaan 31 Desember 2020 adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang sbb :

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol TMT	Jabatan	Pendidikan
1.	<b>TATI YASMARNI, SE, MM</b> NIP. 19630629 198302 2 001 Agam, 29 Juni 1963	IV /c	Kepala Dinas	S2 Manajemen
2.	Drs. EMIL ANWAR NIP. 196406141992031009 Bukittinggi, 14 Juni 1964	IV/b	Sekretaris Dinas	S1 Bimbingan / Konseling
3.	<b>NIRZASASMITA, S.Sos, MM</b> NIP. 19670918 198903 2 004 Agam, 18 Sept 1967	IV/a	Kabid Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	S2 Manajemen
4.	<b>ZULHELMI, SH</b> NIP. 19660527 199103 2 004 Bukittinggi, 27 Mei 1966	IV/a	Kabid Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	S1 HukumTata Negara

5.	dr. SILVIA ANGRAINI,MM NIP. 19701231 200212 2 020 Kubang Putih,31 Des 1970	IV/a	Kabid Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	S2 Magister Manajemen (Kesehatan)
6.	BEDRI,SH NIP. 19670427 199312 2 001 Dumai, 27 April 1967	IV/a	Kabid Pengendalian Penduduk, Advokasi, Informasi dan Penyuluhan	S1 Hukum Perdata
7.	ZULHELMI, S.Sos NIP. 19680310 199203 2 004 Bukittinggi, 10 Maret 1968	III/d	Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	S1 Administrasi Negara
8.	ANNA SEPTIANA, S.Si Nip. 19700913 200212 2 001 Jakarta, 13 september 1970	III/d	Kasubbag Keuangan	S1 Pendidikan Biologi
9.	EVIYANTI, SE NIP. 19771111 200212 2 003 Jambak,11 November 1977	III/d	Kasubbag Perencanaan	S1 Manajemen
10.	Dra. ELIANUR, MM NIP. 19660322 199203 2 007 Padang Panjang, 22 Maret 1966	IV/a	Kasi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum	S2 Manajemen
11.	NINI RAHMI, SKM NIP.19710428 199403 2 003 Agam,28 April 1971	III/d	Kasi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga	S 1 Kesehatan Masyarakat
12.	MIRA ROSY YANTI, SKM NIP. 19751004 200901 2 001 Bukittinggi, 4 Oktober 1975	III/c	Kasi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	S 1 Kesehatan Masyarakat
13.	JAYATRI, S.ST NIP. 19710418 199012 2 001 Dangung-dangung, 18 April 1971	III/d	Kasi Pemenuhan Hak Anak	D IV Ilmu Kebidanan
14.	EMMALIA YULI ISRAWANTI,S.Psi.Psikolog NIP.197707142006042005 Malang,14 Juli 1977	III/d	Kasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	S1 Psikologi
15.	DIANA DESA, SKM NIP. 196801131988122001 Agam, 13 Januari 1968	III/d.	Kasi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	S1 Kesehatan Masyarakat
16.	DEFFI SISDELEN, SE Nip. 19860208 200802 2 001 Bukittinggi, 8 Februari 1986	III/d	Kasi Bina Keluarga Balita, Kualitas Remaja Dan Keluarga Lansia	S1 AKUNTANSI
17.	YENTI EFLITA, S.Sos NIP. 19750927 200212 2 007 Batu Balabuh II,27 September 1975	III/d	Kasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	S1 Administrasi Negara
18.	ZAM ZAMI, SKM NIP. 19650417 198903 1 006 Padang,17 April 1965	III/d	Kasi Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan	S 1 Kesehatan Masyarakat

19.	HENNY ASNAINI,S.Pd.M.Pd Nip 196404121985032007 Medan,12 April 1964	IV/a	Kasi Pengendalian Penduduk,Data Dan Informasi Keluarga	S2 Administrasi Pendidikan
20.	FITRINA, SH NIP. 19650128 198603 2 007 Indragiri Hilir,28 Jan 1965	III/d	Kasi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Penggerakan	S1 Ilmu Hukum
21	NILVA WILDA, SKM Nip. 19710605 199101 2 001 Kampung Dalam, 5 juni 1971	III/d	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan	S1 Kesehatan Masyarakat
22	YENI ASTUTI, SKM NIP. 19770116 200701 2 003 Padang, 16 januari 1977	III/c	Kasi Perlindungan Khusus Anak	S1 Kesehatan Masyarakat
23	YULIA FITRI, A.Md. Kep NIP. 19810720 200604 2 005 Padang, 20 Juli 1981	III/c	Bendahara Pengeluaran	D-3 Kesehatan Keluarga
24.	IKE JUWITA, S.ST NIP. 19810720 200604 2 004 Bukittinggi, 20 Juli 1981	III/c	Staf Keuangan	DIV Ilmu Kebidanan
25.	FATMA ANDRIYANI, Amd.Keb, SKM Nip. 19840123 200803 2 001 Lawang Mandahiling, 23 Januari 1984	III/b	Staf	S1 Kesehatan Masyarakat
26.	MARINA DWI NOVA, S.KM Nip. 19840316200604 2 009 Bukittinggi, 16 maret 1984	III/b	STAF Seksi PKA	S1 Kesehatan Masyarakat
27.	DEDI ANTONAS Nip. 19630516 198503 1 004 Payakumbuh, 16 mai 1963	III/b	Staf Seksi Bina Keluarga Balita Kualitas Remaja dan Keluarga Lansia	SMA IPA
28.	RUSTAM Nip. 19670603 198903 1 003 Bukitinggi, 3 juni 1967	III/b	Staf Seksi KB dan Kesehatan Reproduksi	SMK Keuangan
29.	FETRIA INTANIA, Amd.Keb Nip. 19850227 201101 2 006 Bukittinggi, 27 Februari 1985	III/a	STAF Subbag Keuangan	D-3 Ilmu Kebidanan
30.	ZUZI YULIA, SKM NIP. 19760617 200604 2 014 Pakan Kamis, 17 Juni 1976	III/a	Staf Seksi Pemenuhan Hak Anak	S1 Kesehatan Masyarakat
31.	TATIK SAPUTRI, A.Md Nip. 19840623 201001 2020 Bukittinggi, 23 juni 1984	III/a	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	DIII AKUNTANSI
32.	SITI INDONES, A.Md.Keb. NIP. 19750213 200604 2 007 Durian Tinggi, 13 Februari 1975	II/d	Staf Subbag Perencanaan	DIII Ilmu Kebidanan

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2020

Untuk mengukur kinerja diperlukan perencanaan kinerja. Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diperlukan perumusan, suatu perencanaan Kinerja yang disusun selaras dengan perencanaan, jangka panjang (strategis), perencanaan jangka menengah, dan jangka pendek (taktis).

Keseluruhan perencanaan tersebut (strategis, jangka menengah, dan taktis) mesti jelas panduan arah yang akan dituju dan dalam setiap tahapan kegiatan mesti terukur capaian kinerjanya. Dan juga penting untuk diperhatikan adalah ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya lain sebagai perangkat utama yang akan menjalankan proses perencanaan strategis kedepan.

Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada yang mungkin timbul, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan. Perencanaan Kinerja tersebut meliputi penetapan **Tujuan dan Sasaran, serta cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam tahun 2020 telah ditetapkan rencana strategis dan target kinerja.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi sudah menetapkan Visi pembangunan yaitu; “ *Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama dan Budaya*”. Sedangkan Visi tersebut dituangkan kedalam 4 (empat) Misi, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada misi 5 yaitu :

## MISI 5

Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat

## 2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan Kota Bukittinggi.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

Meningkatkan Keadilan dan kesetaraan gender

Terkendalnya Jumlah Peduduk

Pada tabel berikut dapat dilihat matriks hubungan antara tujuan. dan sasaran yang hendak dicapai. Dimana dalam setiap tujuan memiliki indikator sebagai alat ukur atas tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Tabel 2.2.1

## Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
1	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender	1. Meningkatnya Penguatan Kelembagaan PUG, Kualitas Hidup, peran perempuan dan keluarga dalam pembangunan	a. Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan.
			b. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang mendapat Layanan Komprehensif.
			c. Indeks Kualitas Keluarga
			d. Tingkat Capaian Anugerah Prahita Eka Praya (APE)
		2. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus anak	a. Tingkat Capaian Kota Layak Anak berdasarkan kategori.
			b. Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif
2	Terkendalnya Jumlah penduduk	1. Meningkatnya kualitas Program Keluarga Berencana.	a. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)
			b. Age Specific Fertility Rates (ASFR)
		2. Terwujudnya Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pembangunan Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)

### 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas tata pemerintahan, dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1

Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2020
	3	4		
1.	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan PUG, Kualitas Hidup, peran perempuan dan keluarga dalam pembangunan	a. Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan.	Persentase	56 %
		b. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang mendapat Layanan Komprehensif.	Persentase	100%
		c. Indeks Kualitas Keluarga	Rasio	65,76
		d. Tingkat Capaian Anugerah Prahita Eka Praya (APE)	Kategori	Utama
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus anak	a. Tingkat Capaian Kota Layak Anak berdasarkan kategori.	Kategori	Madya
		b. Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	Persentase	100%
3.	Meningkatnya kualitas Program Keluarga Berencana.	a. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Jumlah	66
		b. Age Spesific Fertility Rates (ASFR)	Jumlah	89
4.	Terwujudnya Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pembangunan Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Rasio	1,52

#### 2.4 Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang harus dilaksanakan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian Kinerja berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola Program atau Kegiatan Instansi dan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kerja Tahun 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi telah menetapkan Perjanjian kinerja sbb:

Tabel 2.4.1  
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2020
	3	4	
5.	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan PUG, Kualitas Hidup, peran perempuan dan keluarga dalam pembangunan	e. Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan.	56 %
		f. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang mendapat Layanan Komprehensif.	100%
		g. Indeks Kualitas Keluarga	65,76
		h. Tingkat Capaian Anugerah Prahita Eka Praya (APE)	Utama
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus anak	c. Tingkat Capaian Kota Layak Anak berdasarkan kategori.	Madya
		d. Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	100%
7.	Meningkatnya kualitas Program Keluarga Berencana.	c. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	66
		d. Age Spesific Fertility Rates (ASFR)	89
8.	Terwujudnya Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pembangunan Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	1,52

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Bukittinggi tahun 2020 merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat Realisasi Kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2020.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Bukittinggi selaku pengemban amanah dalam mendukung visi dan misi Walikota Bukittinggi telah melaksanakan kewajiban dan berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Bukittinggi sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi Tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Akuntabilitas Kinerja ini mencakup 4 sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja.

### **3.1 Metode Pengukuran Capaian Target Kinerja**

Pengukuran kinerja merupakan pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi Tahun 2020. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi serta menganalisa penyebab keberhasilan/ kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang

berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/ kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/ kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1.1**  
**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan**  
**Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020**

No	No Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	> 100%	Memuaskan
2	85% - 99,9%	Sangat Baik
3	75% - 84,9%	Baik
4	55% - 74,9%	Cukup
5	<55%	Kurang Baik

### 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator, dari 4 sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas P3APKB Kota Bukittinggi Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan PUG, Kualitas Hidup, peran perempuan dan keluarga dalam pembangunan	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	56%	60,51	108,05%	
				2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang mendapat Layanan Komprehensif.	100%	100%	100%	
				3	Indeks Kualitas Keluarga	65,76	64,53	98,13%	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				4	Tingkat Capaian Anugerah Prahita Eka Praya (APE).	Utama	Utama	100%	
			Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus anak	5	Tingkat Capaian Kota Layak Anak berdasarkan kategori.	Madya	-	-	
				6	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	100%	100%	100%	
2.	Terkendalinya Jumlah penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Meningkatnya kualitas Program Keluarga Berencana.	7	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	65,6	68,08	103,78%	
				8	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rates /ASFR 15- 19).	90	7,52	191,64%	
			Terwujudnya Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pembangunan Pengendalian Penduduk	9	Total Fertility Rate (TFR)	2,52	2,55	98,81%	

Dari tabel diatas dapat dilihat, capaian rata-rata dari 9 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 4 sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2020 sangat baik.

### 3.3 Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja pada setiap indikator sasaran yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja perlu dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja dengan melakukan perbandingan data hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data pembanding. Analisis capaian kinerja pada Laporan ini akan dilakukan perbandingan data sebagai berikut :

1. Nilai realisasi dengan target tahun 2020;
2. Nilai realisasi tahun 2020 dengan realisasi 3 tahun terakhir;
3. Nilai realisasi tahun 2020 dengan target akhir Renstra.

Dengan dilakukannya analisis dan evaluasi terhadap data hasil pengukuran yang diperoleh, maka akan diperoleh solusi dan dapat dilakukan rekomendasi. Solusi muncul karena diketahuinya faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat capaian kinerja suatu indikator sasaran. Dengan adanya solusi maka dapat diberikan rekomendasi yang dapat digunakan menjadi Rencana Aksi sebagai langkah awal perencanaan perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil capaian terhadap pengukuran indikator kinerja sasaran Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi Tahun 2020 yang telah dicantumkan pada tabel pengukuran kinerja, selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

### **TUJUAN I : MENINGKATKAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER**

Sesuai Penetapan Kinerja Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi Tahun 2020, tujuan ini dicapai melalui 2 sasaran strategis yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi. Adapun sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

#### **Sasaran 1.I Meningkatnya Penguatan Kelembagaan PUG, Kualitas Hidup, peran perempuan dan keluarga dalam pembangunan**

Capaian sasaran strategis 1.1 ini diukur berdasarkan capaian terhadap 4 Indikator Kinerja Utama seperti pada table dibawah ini :

Tabel 3.3.1  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1  
Meningkatnya Penguatan Kelembagaan PUG, Kualitas Hidup, peran perempuan dan keluarga dalam pembangunan

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	56%	60,51%	108,05%
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang mendapat Layanan Komprehensif.	100%	100%	100%
3	Indeks Kualitas Keluarga	65,76	64,53	98,13%
4	Tingkat Capaian Anugerah Prahita Eka Praya (APE).	Utama	Utama	100%

Dari tabel dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 101,5 %. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **memuaskan**.

## 1. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK) adalah Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dilihat dari proporsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja ( bekerja maupun mencari pekerjaan). Semakin tinggi TPAK menunjukkan sebagian besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif.

### 1.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK) diperoleh dengan membandingkan antara Proporsi Penduduk Angkatan Kerja dengan Penduduk usia kerja :

$$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja Perempuan}} \times 100 = \frac{31.655}{52.311} \times 100 = 60,51\%$$

Tabel 1.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
-----	-------------------	--------	-----------	---------

1.	Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	56%	60,51%	108,05 %
----	--	-----	--------	----------

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Tahun 2020 Indikator Kinerja Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah sebesar 108,05% Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2020 sebesar 56%, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2020 telah melebihi target yang ditetapkan dan menunjukkan hasil dengan kategori **memuaskan**. Ini mengindikasikan bahwa program Pengarusutamaan Gender di bidang angkatan kerja perempuan sudah diberi ruang yang semakin baik.

## 1.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan dengan capaian 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

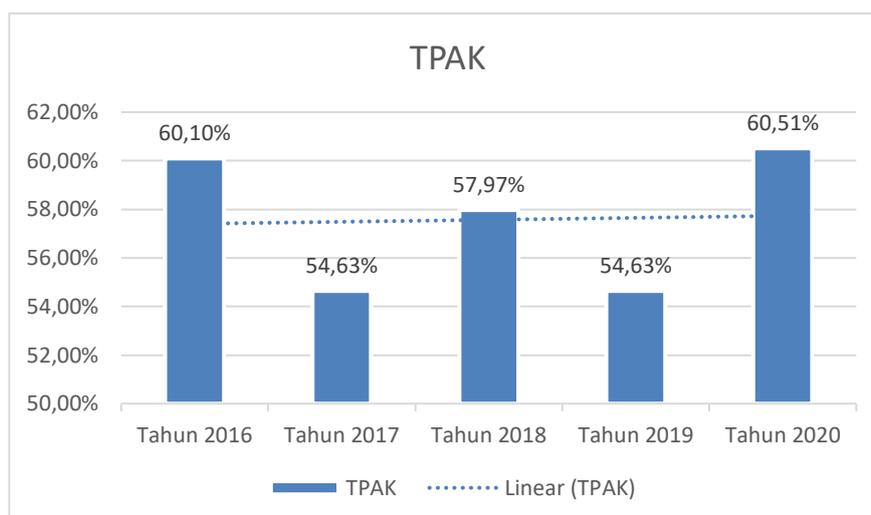
Tabel 1.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan Tahun 2020 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	54,63%	54,63%	100%
2018	55%	57,97%	105,4%
2019	55,63%	54,63%	98,2%
2020	56%	60,51%	108,05%

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini menunjukkan kesetaraan dan keadilan mendapatkan pekerjaan dengan menghasilkan pendapatan bagi perempuan sudah semakin baik.

Perkembangan capaian Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2.1 Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan Tahun 2016 s/d 2020



Tabel 1.2.2  
Data Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja  
Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	Kegiatan Utama	Lak-laki	Perempuan	LK +PR
I	Angkatan Kerja	38.535	31.655	70.190
	a. Bekerja	35.285	29.631	64.916
	b. Pengangguran	3.250	2.024	5.274
II	Bukan Angkatan Kerja	9.658	20.656	30.314
	1. Sekolah	4.784	6.765	11.549
	2. Mengurus rumah tangga	2.290	12.679	14.969
	3. Lainnya	2.584	1.212	3.796
III.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	79,96 %	60,51 %	69,84 %
IV.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,83 %	5,27 %	6,14 %

Sumber Data: BPS Kota Bukittinggi Th 2020

Tabel 1.2.3  
Data Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja  
Kota Bukittinggi Tahun 2019

No	Kegiatan Utama	Lak-laki	Perempuan	LK +PR
I	Angkatan Kerja	35.009	27.274	62.283
	c. Bekerja	32.618	25.828	58.456
	d. Pengangguran	2.391	1.436	3.827
II	Bukan Angkatan Kerja	10.854	22.647	33.501
	4. Sekolah	6.242	8.194	14.436
	5. Mengurus rumah tangga	2.295	13.417	15.712
	6. Lainnya	2.317	1.036	3.353
III.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76,33 %	54,63 %	65,02 %
IV.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,83 %	5,27 %	6,14 %

Sumber Data: BPS Kota Bukittinggi Th 2019

Tabel 1.2.4  
Data Angkatan Kerja dan bukan angkatan kerja Kota Bukittinggi  
Tahun 2018

No	Kegiatan Utama	Lak-laki	Perempuan	LK +PR
I	Angkatan Kerja	36.107	28.444	64.551
	e. Bekerja	33.366	26.569	59.935
	f. Pengangguran	2.741	1.875	4.616
II	Bukan Angkatan Kerja	8.874	20.625	29.499
	7. Sekolah	5.430	9.072	14.502
	8. Mengurus rumah tangga	1.915	10.549	12.464
	9. Lainnya	1.592	1.004	2.533
III.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	80,27 %	57,09 %	68,68 %

IV. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,59 %	6,59 %	7,15 %
--------------------------------------	--------	--------	--------

Sumber Data: BPS Kota Bukittinggi Th 2018

Jika dibandingkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2020 dengan tahun 2019, terdapat penurunan, hal ini disebabkan karena penurunan jumlah penduduk yang bekerja dari 59.935 orang menjadi 58.456 orang, sehingga angka ini akan berpengaruh terhadap jumlah wanita yang bekerja. Perempuan bekerja tahun 2019 sebesar 44,2%, turun 0,1% dari tahun 2018 (44,3%)

Penurunan jumlah yang bekerja disebabkan antara lain meningkatnya wanita menjadi ibu yang beralih mengurus rumah tangga saja

Tabel 1.2.5  
Data Angkatan Kerja dan bukan angkatan kerja Kota Bukittinggi  
Tahun 2017

No	Kegiatan Utama	Lak-laki	Perempuan	LK +PR
I	Angkatan Kerja	33.922	26.384	60.306
	g. Bekerja	31.530	24.591	56.121
	h. Pengangguran	2.392	1.793	4.185
II	Bukan Angkatan Kerja	10.286	21.865	32.151
	10. Sekolah	5.816	8.935	14.751
	11. Mengurus rumah tangga	1.622	11.569	13.191
	12. Lainnya	2.848	1.361	4.209
III.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76,73	54,63	65,23
IV.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,05	6,80	6,94

Sumber BPS kota bukittinggi th 2017, Hasil Sarkernas 2017

Jika dibandingkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2017 dengan tahun 2019, terjadi kesamaan partisipasi angkatan kerja perempuan yaitu 54,63% tapi jika dilihat dari jumlah perempuan yang bekerja mengalami peningkatan dari 24.591

orang tahun 2017 menjadi 25.838 orang pada tahun 2020. Dan pengangguran menurun dari 1.793 orang tahun 2017 menjadi 1.436 orang tahun 2020. Tetapi persentase perempuan bekerja meningkat dari 43,82% tahun 2017 menjadi 44,2 % tahun 2020.

Jika dibandingkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2020 dengan tahun sebelumnya, terdapat penurunan dari tahun 2018 dan sama 2017.

### 1.3. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra

Realisasi capaian indikator Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan dengan target akhir Renstra :

Tabel 1.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra

Indikator	Realisasi tahun 2020	Target Renstra (2021)	Capaian terhadap Renstra
Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	60,51%	56%	108,05%

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2020 sudah melebihi target renstra artinya keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi sudah baik dan perlu tetap dipertahankan.

### 1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan tercapai dikarenakan Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan upaya sebagai berikut :

1. Mengadakan program pelatihan dan keterampilan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi melalui beberapa SKPD terkait termasuk Dinas P3APPKB , yang memiliki manfaat ekonomi secara langsung/memberi peluang bagi perempuan menghasilkan pendapatan, antara lain :
  - a. Memberikan bantuan peralatan dan perlengkapan usaha terhadap kelompok perempuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

- b. Memberikan bantuan bahan baku kepada pelaku usaha perempuan industri rumahan.
  - c. Memberikan berbagai pelatihan kuliner bagi Perempuan korban KDRT dan perempuan berpotensi lainnya.
  - d. Memberikan pelatihan pemasaran Online bagi perempuan industri rumahan.
  - e. Memberikan Order Pemerintah Daerah berupa seragam hari Jum'at kepada pelaku industri bordir perempuan.
  - f. Memberikan order Pemerintah Daerah dalam pemenuhan snack acara ke perempuan industri rumahan.
2. Adanya gerakan pemanfaatan pekarangan oleh TP PKK, melalui bantuan bibit dan sosialisasi langsung ke masyarakat tentang tanam warung hidup, tanam apotik hidup, tanam lumbung hidup dan menanam bunga yang dapat sebagai sumber pendapatan keluarga.
  3. Adanya kelompok-kelompok usaha yang dibentuk dari berbagai latar belakang seperti
    - a. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) adalah kelompok ibu-ibu ber-KB, memiliki waktu luang, dimanfaatkan melakukan usaha, dibina dengan baik secara terus-menerus oleh Dinas P3APPKB
    - b. Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok usaha sejenis, dibina secara terus-menerus oleh Bidang Perindustrian dan Dekranasda
    - c. Kelompok Industri Rumahan ( IRT ), adalah kelompok perempuan yang melakukan kegiatan memproduksi skala rumahan, dibina terus-menerus oleh Dinas P3APPKB
    - d. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) kelompok masyarakat di Kelurahan yang memiliki usaha untuk menambah pendapatan keluarga, dibina terus-menerus oleh Bidang Koperasi dan UKM serta TP PKK
    - e. Kelompok Usaha Bersama ( KUBE ) yaitu kelompok masyarakat lemah, melaksanakan usaha bersama, dibina terus-menerus oleh Dinas Sosial
  4. Adanya Program terintegrasi Kampung KB, termasuk didalamnya kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat
  5. Adanya Program Kampung Wisata, telah mampu menggeliatkan ekonomi masyarakat dan memberi peluang berusaha bagi perempuan.
  6. Adanya kegiatan pameran dan promosi bagi produk unggulan daerah secara online, telah pula membuka kesempatan melakukan transaksi penjualan dalam partai kecil, menengah dan besar baik didalam daerah maupun luar daerah terutama pemenuhan permintaan masker.

### 1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai kinerja Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan dukungan anggaran di Dinas P3APPKB sangatlah minim, karena itu Dinas melakukan kerjasama dengan SKPD terkait untuk melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui :

1. Mengikutsertakan perempuan rentan binaan Dinas P3APPKB, sebagai peserta pelatihan yang diadakan oleh SKPD terkait yang diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan tersebut.
2. Melakukan kerjasama yang intens dengan TP PKK disemua tingkatan
3. Melakukan pertemuan kemitraan dengan seluruh SKPD Pembina kampung KB
4. Merekomendasi pelaku usaha perempuan mengikuti berbagai event pameran secara online
5. Merekomendasikan perempuan rentan yang mempunyai peluang ekonomi yang baik ke BAZ Kota Bukittinggi.

Dengan cara mengkolaburasikan kegiatan dengan SKPD terkait, terjadi efisiensi sumber daya anggaran , sumber daya manusia dan sumber daya waktu.

Walaupun capaian yang diharapkan tidak maksimal, karena kegiatan di SKPD terkait memiliki kriteria tersendiri dan tidak dapat dimanfaatkan secara total namun kolaborasi program ternyata memberikan hasil yang baik.

### 1.6. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran **Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan** adalah sebagai berikut :

**Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan**  
 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan bertujuan untuk melakukan pemberdayaan perempuan sehingga perempuan berpartisipasi dalam pembangunan, pendidikan, politik, ekonomi dan terlibat dalam kegiatan publik yang lebih luas serta diskriminasi terhadap perempuan bisa diminimalisir.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 148.930.644,- dengan realisasi sebesar Rp. 145.793.447,- dan tingkat realisasi mencapai angka 97,89%.

#### 1) Pembinaan dan pengembangan Ekonomi Perempuan

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Perempuan yang mendapatkan pembinaan ekonomi dengan target 25 orang dengan alokasi dana sebesar Rp. 17.164.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 17.092.000,- dengan tingkat realisasi keuangan 97,62% dan capaian realisasi fisik 100%.

## **2. PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPAT LAYANAN KOMPREHENSIF.**

Berdasarkan Prosedur Standar Operasional Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak yang disusun dan diterbitkan oleh Bagian Pengaduan Masyarakat Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan berdasarkan pada perbedaan jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati semua hak dan kebebasannya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga terjadi di Kota Bukittinggi. Untuk melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagaimana disebut di atas, maka Pemerintah Kota Bukittinggi mempunyai tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan semaksimal mungkin kepada masyarakatnya, terutama perempuan dan anak melalui Dinas P3APPKB.

### **2.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020**

Dari jumlah kasus yang dilaporkan masyarakat Kota Bukittinggi sepanjang tahun 2020, Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang mendapat Layanan Komprehensif dapat dihitung dengan ” *jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif dibandingkan dengan jumlah perempuan korban kekerasan di Kota Bukittinggi*”.

*Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang mendapat Layanan Komprehensif*

$$= \frac{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif}}{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan}} \times 100 = \frac{16}{16} \times 100$$

$$= 100\%$$

Tabel 2.1.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang mendapat Layanan Komprehensif tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang mendapat Layanan Komprehensif	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Tahun 2020 Indikator Kinerja Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapat layanan komprehensif adalah sebesar 100%, artinya semua perempuan yang menjadi korban kekerasan dapat dilayani secara komprehensif sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan dan menunjukkan hasil dengan kategori **memuaskan**.

Namun layanan yang diberikan baru sebatas yang melakukan aduan ke Dinas P3APKKB. Karena itu Dinas P3APPKB bertekad selalu menghimbau partisipasi masyarakat untuk secara aktif menjadi pelopor dan pelapor apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan disekitar tempat tinggal masing-masing.

Dinas P3APPKB harus mampu berperan aktif dalam berbagai upaya melindungi perempuan dan anak, yang dimanifestasikan dalam bentuk pelayanan pengaduan langsung ke Dinas P3APPKB, selanjutnya dilakukan kerjasama dengan stake holder terkait, salah satunya dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bukittinggi dan memfasilitasi pendampingan dan penjangkauan kepada masyarakat, utamanya para perempuan yang mengalami kekerasan.

Prinsip prinsip layanan:

1. Non diskriminasi

2. Kesetaraan dan menghormati
3. Menjaga privasi dan kerahasiaan
4. Memberikan rasa aman dan nyaman
5. Menghargai perbedaan individu
6. Tidak menghakimi

Standar pelayanan kasus Kekerasan terhadap perempuan adalah sbb:

1. Penjangkauan/datang sendiri/rujukan
2. Pencatatan pengaduan, dan langkah selanjutnya berkoordinasi dg pihak terkait.
3. Wawancara & Screening
4. Melakukan pendampingan korban/assesment sesuai kebutuhan korban
5. Pendampingan lanjutan terhadap korban/pelaku perempuan
6. Pendampingan rujukan terhadap korban/pelaku perempuan
7. Konseling keluarga korban/pelaku
8. Pengisian Inform Consent
9. Membuat rekomendasi lanjutan.
10. Melakukan rujukan:
  - a) Pelayanan Kesehatan.
  - b) Rehabilitasi Sosial.
  - c) Bantuan Hukum.
  - d) Pemulangan
  - e) Reintegrasi Sosial.
  - f) Keluarga
  - g) Keluarga Pengganti

## **2.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir**

Perempuan Korban Kekerasan Yang mendapat Layanan Komprehensif pada 3 (tiga) tahun terakhir, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1 Jumlah perempuan korban kekerasan 3 (tiga) tahun Terakhir di Kota Bukittinggi

Tahun	Jumlah Korban	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	Perempuan Korban Kekerasan yang mendapat layanan komprehensif
2017	20	20	100%
2018	22	22	100%
2019	38	38	100%
2020	16	16	100%

Sumber data P2TP2A Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat terjadi penurunan kasus secara signifikan. Keberhasilan tidak hanya dilihat dari capaian kinerja 100% karena seluruh perempuan yang melakukan pengaduan dapat dilayani seluruhnya oleh Dinas P3PPKB namun keberhasilan yang lebih hakiki terjadi penurunan jumlah kasus yang mengindikasikan sosialisasi three end (akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan, dan akhiri perdagangan manusia), berhasil.

Tabel 2.2.2 Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2020 dengan 3 (tiga) tahun terakhir Indikator Sasaran Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang mendapat Layanan Komprehensif

Tahun	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang mendapat Layanan Komprehensif		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Tahun 2017	100%	100%	100%
Tahun 2018	100%	100%	100%
Tahun 2019	100%	100%	100%
Tahun 2020	100%	100%	100%

Capaian diatas menggambarkan seluruh pengaduan kekerasan terhadap perempuan dapat terlayani dan tertangani dengan baik, namun ukuran keberhasilan diharapkan dapat digambarkan melalui penurunan jumlah kasus dan tingkat kualitas kasus, karena itu perlu dukungan anggaran yang serius agar dapat dilakukan pendataan setiap tahun dan anggaran penanganan kasus tersedia dalam jumlah yang cukup.

### 2.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 2.3.1 Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

No	Uraian	Realisasi tahun 2020	Target Renstra (2021)	Capaian terhadap Renstra
1.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang mendapat Layanan Komprehensif.	100%	100%	100%

Perempuan Korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif setiap tahunnya sudah mencapai target yang ditetapkan pada akhir masa Renstra.

#### **2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan dalam memberikan pelayanan secara komprehensif kepada korban kekerasan tidak terlepas dari upaya dan komitmen Dinas P3APPKB untuk terus mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Dinas P3APPKB selaku SKPD yang mengawal program perlindungan terhadap perempuan., melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang pada tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kelurahan dalam menangani permasalahan kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Kota Bukittinggi.
2. Melibatkan Bapak – Bapak dalam kegiatan FGD yang membahas pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Melibatkan masyarakat sebagai kader pola asuh anak dan remaja diseluruh Kelurahan.

Selama ini ada beberapa hal yang menyebabkan masyarakat enggan untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, yaitu :

1. Adanya anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan keluarga sendiri tidak perlu dicampuri orang lain;
2. Pelaku tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga lebih banyak dilakukan orang terdekat, sehingga dianggap aib ;
3. Kepedulian yang rendah dari lingkungan

#### **2.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dengan keterbatasan SDM yang tersedia, Dinas P3APPKB melakukan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan melalui peningkatan peran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Masalah Perempuan pada tingkat kelurahan selaku perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan penjangkauan dan pendampingan pertama terhadap permasalahan perempuan dilingkungan Kelurahan masing-masing.

Pada tahun 2020 Dinas P3APPKB melakukan pengendalian kasus kekerasan terhadap perempuan dengan :

- Meningkatkan Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
- Meningkatkan peran serta elemen/lembaga masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
- Peningkatan program Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan.
- Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan melalui mobil perlindungan perempuan.
- Meningkatkan SDM pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan melalui berbagai pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Dinas PPPA Prov. Sumbar)
- Bekerjasama dengan TP PKK Kota Bukittinggi dan organisasi perempuan yang ada di Kota Bukittinggi dalam mensosialisasikan program-program terkait Perlindungan Perempuan dan Anak.

## **2.6 Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator**

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran **Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang mendapat Layanan Komprehensif** adalah sebagai berikut :

### **Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 434.788.296,- dengan realisasi sebesar Rp. 432.991.048,- dan tingkat realisasi mencapai angka 99,59%.

#### **1) Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Penanganan dan pendampingan korban pasca kekerasan dengan target 1 lembaga, 40 kasus dan alokasi dana sebesar Rp. 152.950.285,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 151.586.559,- dengan tingkat realisasi keuangan 99,11% dan capaian realisasi fisik 100%.

### **3. INDEKS KETAHANAN KELUARGA**

Keluarga merupakan unit masyarakat yang terkecil yang memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pengembangan kualitas SDM yang mencakup pengembangan kemampuannya, kemampuan menghadapi tantangan dan mencegah resiko terhadap masalah di sekeliling mereka.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, diharapkan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah menyusun dan mengembangkan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis yang berpedoman pada konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang di dalamnya mencakup: 1. landasan legalitas dan keutuhan Keluarga, 2. Ketahanan fisik, 3. Ketahanan ekonomi, 4. Ketahanan sosial psikologi dan 5. Ketahanan sosial budaya. Peraturan ini bertujuan antara lain; mendorong penerapan konsep Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam semua kegiatan pembangunan yang sasarannya dan/atau ditujukan untuk Keluarga dan meningkatkan pelaksanaan kebijakan pembangunan keluarga bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Ketahanan keluarga merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar.

Indikator Ketahanan keluarga terdiri dari 5 dimensi , 15 Variabel dan 24 indikator

1. Dimensi Landasan Legalitas dan Keutuhan keluarga : 3 Variabel : Landasan Legalitas, Keutuhan keluarga dan Kemitraan Gender

2. Dimensi Ketahanan Fisik : 3 variabel yaitu Kecukupan Pangan dan Gizi, Kesehatan Keluarga dan Ketersediaan lokasi tetap untuk tidur.
3. Dimensi Ketahanan Ekonomi : 4 Variabel yaitu Tempat tinggal keluarga, Pendapatan Keluarga, Pembiayaan pendidikan anak, Jaminan Keuangan keluarga
4. Dimensi Ketahanan Sosial-Psikologis : 2 variabel yaitu Keharmonisan keluarga dan Kepatuhan terhadap hukum.
5. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya : 3 variabel, yaitu Kepedulian social, Keeratan Sosial, Ketaatan beragama

Ketahanan keluarga mencerminkan kecukupan dan kesinambungan akses suatu keluarga terhadap pendapatan dan sumber daya agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, partisipasi di dalam masyarakat, dan integrasi sosial.

### 3.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

*Indeks Ketahanan Keluarga = Ukuran Tingkat Ketahanan Keluarga Yang Dapat digunakan Sebagai Baseline Perkembangan Tingkat Ketahanan Keluarga*

*(64,53)*

Tabel 3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Indeks Ketahanan Keluarga tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Ketahanan Keluarga	65,76	64,53	98,13

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Tahun 2020 Indikator Indeks Ketahanan Keluarga adalah sebesar 64,53, jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2020 sebesar 65,76, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Indeks Ketahanan keluarga tahun 2020 tidak mencapai target yang ditetapkan dan menunjukkan hasil dengan kategori **sangat baik**.

Tidak tercapainya target indeks ketahanan keluarga disebabkan oleh ekses pandemic covid 19 dimana masyarakat dihadapkan kepada berbagai permasalahan terutama permasalahan ekonomi yang mempunyai dampak kuat kepada pendapatan keluarga, pembiayaan pendidikan anak, jaminan keuangan keluarga kecukupan pangan dan gizi dan kesehatan keluarga.

### 3.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra

Realisasi capaian indikator Indeks Ketahanan Keluarga dibandingkan dengan target akhir Renstra adalah :

Tabel 3.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra

Indikator	Realisasi tahun 2020	Target Renstra (2021)	Capaian terhadap Renstra
Indeks Ketahanan Keluarga	64,53	65,76	98,13

Dari table diatas mengisyaratkan kepada kita bahwa program penguatan Indeks Ketahanan Keluarga perlu menjadi perhatian khusus, harus ada strategi dalam masa pandemi Covid 19 ini

### 3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam pembangunan. Oleh karena itu, keluarga perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan.

Di Kota Bukittinggi telah dilakukan berbagai program kegiatan yang mendukung tercapainya ketahanan keluarga seperti menumbuhkan budaya kemitraan gender, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, menumbuhkan kesukaan terhadap literasi ketahanan keluarga.

Faktor keberhasilan Indikator Ketahanan keluarga adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan program terhadap landasan perkawinan melalui Isbat Nikah.
2. Adanya program penguatan keutuhan Keluarga melalui program Sekolah keluarga
3. Adanya Program bersama kecukupan pangan dan gizi melalui pemanfaatan pekarangan oleh masyarakat.
4. Adanya kampanye yang kuat terhadap pentingnya Kesehatan keluarga
5. Adanya upaya keluarga mencari alternative pendapatan keluarga
6. Adanya bantuan pembiayaan pendidikan anak.

7. Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat
8. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap agama.

### **3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam mencapai indikator ketahanan keluarga Dinas P3APKB memanfaatkan sumber daya sendiri (Psikolog, Nakes dan SDM terdidik lainnya) dan melakukan kerjasama dengan SKPD dan lembaga terkait untuk memastikan tenaga yang memiliki kompetensi di bidangnya dapat berkontribusi.

### **3.5 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator**

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran **Indeks Kualitas Keluarga** adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan**

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan bertujuan untuk melakukan pemberdayaan perempuan sehingga perempuan berpartisipasi dalam pembangunan, pendidikan, politik, ekonomi dan terlibat dalam kegiatan publik yang lebih luas serta diskriminasi terhadap perempuan bisa diminimalisir.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 148.930.644,- dengan realisasi sebesar Rp. 145.793.447,- dan tingkat realisasi mencapai angka 97,89%.

##### **1) Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.**

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah PKK yang Aktif dengan target 3 kecamatan dengan alokasi dana sebesar Rp112.358.644,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 109.398.247,- dengan tingkat realisasi keuangan 97,37% dan capaian realisasi fisik 100%.

#### **2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 434.788.296,- dengan realisasi sebesar Rp. 432.991.048,- dan tingkat realisasi mencapai angka 99,59%.

### 1) Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Keluarga yang dibina dengan target 720 Keluarga dengan alokasi dana sebesar Rp.280.852.211,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 280.418.689,- dengan tingkat realisasi keuangan 99,85% dan capaian realisasi fisik 100%.

### 4. Tingkat Capaian Anugerah Prahita Eka Praya (APE).

Anugerah Parahita Ekapraya merupakan penghargaan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan lembaga atas prakarsa dan prestasinya dalam melaksanakan pembangunan yang menjamin keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan, proses, hasil dan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk (laki-laki dan perempuan) yang programnya dikenal dengan pengarusutamaan gender.

Dasar hukum pelaksanaan adalah Sustainable development goals (SDGs) yang mencakup 17 tujuan dan tujuan ke 5 nya adalah menjamin kesetaraan gender. Pemerintah Indonesia mengikatkan diri kepada perjanjian global ini yang disepakati oleh 193 negara dengan menetapkan peraturan dan ketentuan sebagai berikut :

1. UU No 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan
2. Permendagri no 67 tahun 2011 tentang perubahan atas permendagri No 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan Gender.
3. Inpres No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan
4. Kepmenkeu no. 807 tahun 2018 tentang pedoman implementasi

Aspek diskriminasi/kesenjangan dalam isu gender yang dikawal oleh program Pengarusutamaan gender adalah :

1. Akses; belum adil/belum setara kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat pembangunan.
2. Partisipasi; belum adil/belum setara keikutsertaan laki-laki dan perempuan dalam satu kegiatan dan program pembangunan.
3. Kontrol; belum adil/belum setara peran laki-laki dan perempuan dalam menjalankan fungsi pengendalian atas sumber daya dan pengambilan keputusan.
4. Manfaat; belum adil/belum setara peran laki-laki dan perempuan sebagai pihak yang menerima dan menggunakan hasil-hasil suatu kebijakan/program pembangunan.

Pemerintah Kota Bukittinggi sudah melaksanakan program Pengarusutamaan gender ini dengan memenuhi 7 prasyarat yaitu :

1. Komitmen politik Walikota bukitinggi yang tertuang dalam Renstra dan Renja
2. Adanya kebijakan berupa Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Adanya kelembagaan yang mendukung seperti tim driver, Pokja dan Fokal point.
4. Adanya sumber daya manusia dan sumber daya anggaran
5. Adanya data terpilah
6. Adanya alat analisis
7. Adanya partisipasi masyarakat.

#### 4.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

*Anugerah Parahita Eka Praya (APE) = penghargaan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan lembaga atas prakarsa dan prestasinya dalam melaksanakan pembangunan yang menjamin keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan, proses, hasil dan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk (laki-laki dan perempuan).*

*(Utama)*

Tabel 4.1.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja Anugerah Parahita Eka Praya (APE) tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Anugerah Parahita Eka Praya (APE)	Utama	Utama	100%

Tingkat capaian penghargaan Anugerah Eka Praya (APE) di posisi utama disebabkan oleh terpenuhinya indikator :

A. pelembagaan pengarusutamaan gender yang terdiri dari :

1. Komitmen Pemerintah Kota Bukittinggi (Peraturan (PERDA), Perwako, Surat Edaran, Surat Keputusan)
2. Adanya kebijakan (Strategi, Program, serta sistem penganggaran dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi)
3. Adanya Kelembagaan (Adanya tim driver, Pokja dan Focal Point)
4. Adanya Sumber Daya Manusia dan Anggaran
5. Adanya data system informasi dan KIE
6. Adanya pedoman dan metode
7. Adanya peran serta masyarakat

B. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender :

1. Kebijakan yang responsive gender
2. Pelaksanaan pengarusutamaan gender
3. Pelayanan Pengarusutamaan gender
4. Anggaran Pengarusutamaan gender
5. Peran serta masyarakat dan jejaring

#### **4.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir**

Berikut realisasi capaian indikator Anugerah Parahita Eka Praya (APE) dibandingkan dengan capaian 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Anugerah Parahita Eka Praya (APE) Tahun 2020 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Anugerah Parahita Eka Praya (APE)		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2016	Madya	Madya	100%
2017	-	-	
2018	Utama	Utama	100%
2019	-	-	
2020	Utama	Utama	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Anugerah Parahita Eka Praya (APE) sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertahan diposisi Utama, artinya Pemerintah Kota Bukittinggi telah memenuhi 7 prasyarat pengarusutamaan gender dan mengkonsentrasikan kepada 4 aspek diskriminasi dan kesenjangan yang dinilai Gapnya semakin kecil.

#### **4.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra**

Realisasi capaian Anugerah Parahita Eka Praya (APE) dibandingkan dengan target akhir Renstra :

Tabel 4.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Anugerah Parahita Eka Praya (APE) Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra

Indikator	Realisasi tahun 2020	Target Renstra (2021)	Capaian terhadap Renstra
Anugerah Parahita Eka Praya (APE)	Utama	Utama	100%

Dari tabel diatas menggambarkan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam memahami konsep gender tidak lagi bias serta perencanaan dan penganggaran responsive gender (PPRG) sudah mengintegrasikan perspektif gender dengan cara penelaahaan dampak dari suatu belanja kegiatan terhadap keadilan dan kesetaraan gender.

#### **4.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan tingkat capaian Anugerah Prahita Ekapraya di posisi utama disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Dukungan pimpinan
2. Adanya Randa PUG yang setiap 3 bulan dilaporkan kepada secretariat kepresidenan.
3. Adanya review dari Inspektorat
4. Pemahaman petugas perencanaan terhadap PPRG semakin baik
5. Dukungan SKPD terkait baik.
6. Program dan kegiatan di SKPD sudah memakai gender analysis pathway
7. Setiap SKPD membuat gender budget statement.

#### **4.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

1. Penggunaan Sumber Daya manusia dan sumber daya anggaran dengan memaksimalkan kekuatan internal Dinas P3APPKB
2. Dukungan SDM dan anggaran dari Bapelitbang, Badan Keuangan dan Inspektorat.
3. Dukungan SDM tenaga perencana di seluruh SKPD
4. Dukungan anggaran dari seluruh SKPD melalui program kegiatan yang responsive gender.

#### **4.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator**

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran **Tingkat Capaian Anugerah Prahita Eka Praya (APE)** adalah sebagai berikut :

## 1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 202.282.993,- dengan realisasi sebesar Rp. 201.446.339,- dan tingkat realisasi mencapai angka 99,59%.

### 1) Kelembagaan Pengarusutama gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Pendampingan Perencanaan Penganggaran yang responsive gender oleh focal point dengan target 28 SKPD dan alokasi dana sebesar Rp. 32.008.250,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 31.980.650,- dengan tingkat realisasi keuangan 99,91% dan capaian realisasi fisik 100%.

### 2) Pengelolaan Data Gender dan Anak

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Update data gender dan Anak dengan target 1 Dokumen dan alokasi dana sebesar Rp. 11.520.750,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 11.408.750,- dengan tingkat realisasi keuangan 99,03% dan capaian realisasi fisik 100%.

## 2. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan bertujuan untuk melakukan pemberdayaan perempuan sehingga perempuan berpartisipasi dalam pembangunan, pendidikan, politik, ekonomi dan terlibat dalam kegiatan publik yang lebih luas serta diskriminasi terhadap perempuan bisa diminimalisir.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 148.930.644,- dengan realisasi sebesar Rp. 145.793.447,- dan tingkat realisasi mencapai angka 97,89%.

### 2) Perkuatan Organisasi Perempuan

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi dengan target 3 Organisasi dan alokasi dana sebesar Rp. 19.408.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 19.303.200,- dengan tingkat realisasi keuangan 99,46% dan capaian realisasi fisik 100%.

**Sasaran 1.2 Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak**

Capaian sasaran strategis 1.2 ini diukur berdasarkan capaian terhadap 2 indikator Kinerja Utama seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.2.1  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.2  
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

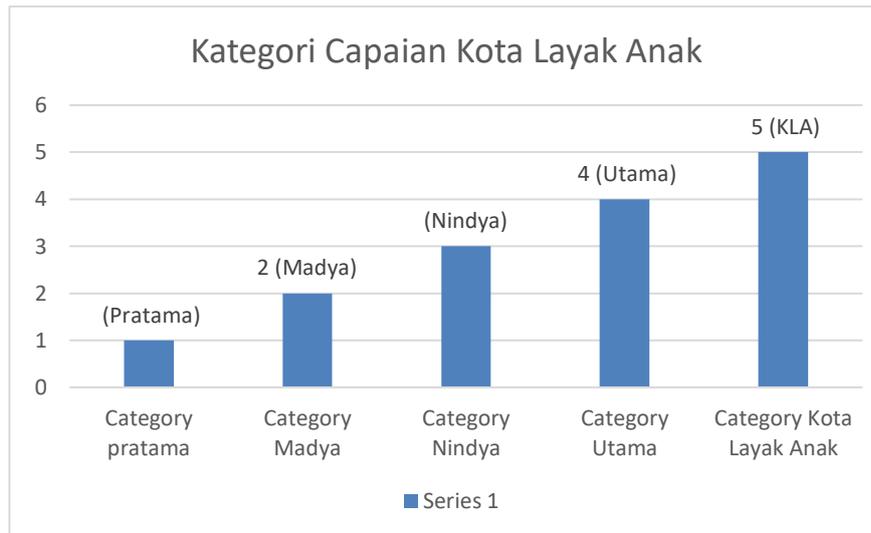
No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Tingkat Capaian Kota Layak Anak berdasarkan kategori.	Madya	-	0%
2	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	100%	100%	100%

#### 5. Tingkat Capaian Kota Layak anak berdasarkan Kategori

Kota Layak Anak adalah Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan yang diukur melalui 24 Indikator yang mencerminkan pemenuhan hak dan perlindungan anak dari aspek kelembagaan dan 5 (lima) klaster substansi Konvensi Hak Anak (KHA). Dengan kategori :

- Pratama;
- Madya;
- Nindya;
- Utama dan ;
- Kota Layak Anak (KLA).

Gambar 3.4  
Tingkat Capaian Kota Layak Anak berdasarkan Kategori



### 5.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 5.1.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja Capaian Kota Layak anak berdasarkan Kategori tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Capaian Kota Layak anak berdasarkan Kategori	Madya	-	-

Semenjak tahun 2017 Kementerian PPPA berkomitmen untuk melakukan penilaian Kota Layak Anak setiap tahunnya, namun **Pada tahun 2020 Penilaian Kota Layak Anak tidak dilakukan oleh Kementerian PP-PA karena pandemi covid-19.**

### 5.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

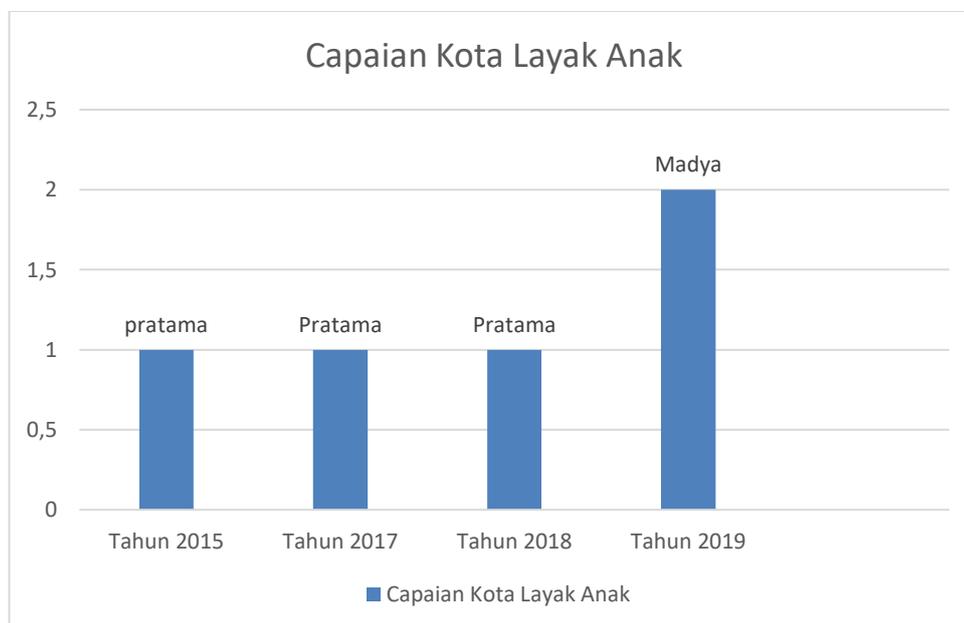
Berikut realisasi capaian indikator Capaian Kota Layak Anak berdasarkan Kategori dibandingkan dengan capaian 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.1 Perbandingan Capaian Kota Layak Tahun 2020 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Capaian Kota Layak anak berdasarkan Kategori		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	Pratama	Pratama	100%
2018	Pratama	Pratama	100%
2019	Madya	Madya	100%
2020	Madya	-	-

Gambar 5.2.1

Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan 3 (tiga) tahun terakhir Indikator Sasaran Capaian Kota layak anak berdasarkan kategori



Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2019 Dinas P3APPKB telah berhasil mencapai target indikator kinerja Kota Layak anak di posisi Madya, namun dari 5 klaster yang wajib dipenuhi dalam evaluasi Kota layak anak keberpihakan pemenuhan Hak anak ditahun – tahun berikutnya diharapkan di strata Nindya, dengan dukungan penuh ketersediaan data dan dokumentasi dari SKPD terkait, yang menyebabkan Pemerintah Kota Bukittinggi punya pembuktian fakta indikator layak anak.

Capaian Kota Layak Anak pada tahun 2019 sudah berada di posisi Madya, artinya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak yang sudah dilaksanakan Pemerintah Kota Bukittinggi baru mencapai 62%. Indikator Kota Layak Anak.

Indikator yang dievaluasi adalah sebagai berikut :

1. Indikator 1: Tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak
  - Perda Perlindungan Anak, seperti yang diharapkan Pemerintah Pusat belum ada, namun Pemerintah Kota Bukittinggi telah memiliki Perda No 4 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Pada tahun 2020 Dinas P3APPKB mengusulkan draft Perwako Perlindungan Anak, dan disarankan oleh Bagian Hukum bahwa Perda nomor 4 tahun 2015 sudah cukup kuat untuk mendukung perlindungan anak, namun perlu di tambahkan dengan Perwako sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pada masing-masing klaster.
2. Indikator 2 : Menguatnya Kelembagaan Kab/Kota Layak Anak
  - Tim Gugus tugas sudah ada tetapi belum maksimal dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dikarenakan masih lemahnya komitmen dukungan, termasuk anggaran
  - Untuk mempermudah penginputan data telah di bentuk Kelompok Kerja Data Indikator Kota Layak Anak yang di SK kan oleh Wali Kota. Namun kinerja pokja data belum maksimal, karena lemahnya komitmen dari SKPD terkait.
3. Indikator 3 : Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak.
  - Lembaga masyarakat yang berperan dalam mewujudkan KLA adalah P2TP2A, BKB, BKR, LK3, Lembaga pemerhati anak, PWK, GOW, IBI, Forum Anak dalam bentuk sosialisasi, layanan konsultasi, bantuan berupa sarana dan prasarana, kampanye.
  - Belum terbentuknya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) sebagai bentuk kepedulian Dunia Usaha terhadap pemenuhan hak anak. Tahun 2020 telah disosialisasikan dengan mengundang pimpinan Perusahaan yang dinilai sesuai kriteria. Namun kepengurusan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) belum berhasil dibentuk, karena yang hadir mengikuti sosialisasi bukan unsur pimpinan/pengambil keputusan, walaupun demikian Dunia Usaha telah berperan dalam mewujudkan KLA dengan memberikan dukungan dan bantuan pada kegiatan – kegiatan yang melibatkan anak di Kota Bukittinggi.
  - Media yang sudah berperan dalam mewujudkan KLA adalah RRI, radio jam gadang, media cetak dan mupen berupa dialog interaktif, KIE ke keurahan.
4. Indikator 4 : Presentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan Kutipan akte kelahiran.
  - Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan mampu meningkatkan cakupan anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran yaitu sejumlah 92,20%, tahun sebelumnya sejumlah 92,05 % dan SDM penyelenggara registrasi kelahiran juga telah dilatih Konvensi Hak Anak.

5. Indikator 5

- Sudah ada Peraturan yang terkait dengan Informasi Layak Anak yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Warung Internet, namun perlu di sempurnakan sesuai dengan kondisi kekinian
- Sudah ada Informasi Layak anak seperti Taman Baca, Pustaka dan Pustaka Keliling serta TESA (Telepon Sahabat Anak) yang berfungsi sebagai sarana untuk informasi pengaduan dan SDM penyelenggara pelayanan ILA sudah dilatih Konvensi Hak Anak.

6. Indikator 6: Terlembaganya partisipasi anak

- Sudah terbentuknya lembaga partisipasi anak yaitu Forum Anak di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan yang merupakan wadah aspirasi anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kota Bukittinggi, masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena masih ada pihak kelurahan yang belum mengikutsertakan Forum Anak dalam Kegiatan Pra Musrenbang dan Musrenbang.
- Upaya yang telah dilakukan adalah kegiatan capacity building Forum anak ,Roadshow ke 24 kelurahan untuk pengembangan forum anak kelurahan, mengalokasikan dana untuk korban gempa di Lombok, Palu, Sosialisasi Hak Anak ke panti asuhan dan kampanye hak anak.
- Sekretariat Forum Anak masih belum memadai karena keterbatasan sarana dan prasarana.

7. Indikator 7 : Persentase perkawinan anak

- Perda pencegahan perkawinan anak belum ada, namun Pemerintah Kota Bukittinggi sudah memiliki Edaran tentang Penerbitan Rekomendasi Izin Perkawinan.
- Upaya yang dilakukan Forum anak adalah melakukan kampanye pencegahan perkawinan di usia anak.

8. Indikator 8 : Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga

- Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)/layanan keluarga dengan psikolog/sejenisnya sebagaimana program dari Kementerian PPPA belum ada, karena terkendala oleh sarana dan prasarana namun Pemerintah Kota Bukittinggi sudah memiliki Lembaga Konsultasi seperti P2TP2A, LK3, BKB, BKR, dan Sekolah Keluarga.
9. Indikator 9 : Persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi
- Dari 3 panti asuhan yang ada di Kota Bukittinggi 2 diantaranya sudah terstandarisasi, angka ini menunjukkan capaian Panti Asuhan yang terstandarisasi adalah 66,6% dan SDM pelayanan lembaga pengasuhan alternatif sudah dilatih Konvensi Hak Anak sejumlah 1 orang.
10. Indikator 10 : Persentase pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD HI).
- Dari 108 PAUD yang ada di Kota Bukittinggi yang sudah mencapai PAUD HI sebanyak 13 PAUD angka ini menunjukkan capaian PAUD HI 12% yang tersebar di 13 Kelurahan. .
  - SDM pelayanan PAUD-HI yang telah dilatih Konvensi Hak Anak sebanyak 2 PAUD HI, ini disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk kegiatan Pelatihan Konvensi Hak Anak.
11. Indikator 11 : Tersedia Infrastruktur (sarana dan prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak.
- Ruang Publik yang Ramah Anak sudah ada yaitu Ruang Bermain Anak di Taman By Pass SBY, telah disertifikasi oleh Kementerian PPPA sebagai Ruang Bermain Ramah Anak dan akan dilakukan audit oleh kementerian PPPA setiap tahun selama 2 tahun berturut-turut. Untuk itu perlu pemeliharaan dan pengembangan Ruang Bermain Ramah Anak ini agar sertifikasi yang telah di berikan oleh Kementrian PPPA dapat dipertahankan dan menjadi permanen.
  - SDM pengelola RBRA taman By Pass SBY telah di latih Konvensi Hak Anak.
  - Rute Aman Selamat dari dan ke Sekolah (RASS) yang sesuai standar belum ada namun Zona Aman Selamat Sekolah sudah ada.
  - SDM penyelenggara program Rute Aman Selamat dari dan ke Sekolah (RASS) telah dilatih Konvensi Hak Anak sebanyak 1 orang.
12. Indikator 12 : Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Cakupan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sejumlah 90,7% terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 89,7% (diatas angka nasional 73,61%)

- Terdapat angka kematian ibu sebanyak 2 orang (73,8/100.000 kelahiran hidup) tahun sebelumnya 1 orang (36,9/100.000 kelahiran hidup) terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya namun masih dibawah angka nasional.(305/100.000 kelahiran hidup)

### 13. Indikator 13 : Prevalensi Status Gizi Balita

- Perda tentang pencegahan dan penanganan masalah gizi kurang, gizi lebih, pendek (stunting) belum ada, namun pelaksanaan pencegahan dan penanganan masalah gizi kurang, gizi lebih, pendek (stunting) mengacu kepada Permenkes No. 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang.
- Balita yang berada pada kategori kekurangan gizi (underweight) sejumlah 8,8%, pada tahun sebelumnya sejumlah 9,8%, terdapat penurunan dari tahun sebelumnya.
- Balita yang berada pada kategori gizi lebih sejumlah 2,6% sedangkan pada tahun sebelumnya sebanyak 1,3% terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya namun masih dibawah angka nasional yaitu 11,8%
- Balita yang berada pada kategori stunting sejumlah (21,5%) sedangkan pada tahun sebelumnya sejumlah 24,4% terdapat penurunan dari tahun sebelumnya namun masih dibawah angka nasional yaitu 37,2%.

### 14. Indikator 14 : Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun

- Perda tentang ASI Eksklusif sedang dalam proses (sudah dilakukan advokasi dan koordinasi Ranperda ASI Eksklusif) namun sudah ada Edaran Wako tentang Pemberian Asi Eksklusif dan Instruksi Wako Tentang Penyediaan Pojok Laktasi, tetapi berdasarkan kondisi dilapangan masih banyak Instansi Pemerintah dan tempat pelayanan publik belum mempunyai Pojok Laktasi
- Cakupan pemberian ASI Eksklusif sejumlah 72,5%, terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 76,8%, namun masih di atas angka nasional yaitu 52,3%, salah satu penyebab rendahnya capaian ASI Eksklusif adalah masih kurangnya pengadaan ruang laktasi.
- Cakupan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi baru lahir sejumlah 50,38% tahun sebelumnya sejumlah 46,17% menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya.

### 15. Indikator 15 : Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

- Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak sejumlah 28,57%, sedangkan pada tahun sebelumnya sejumlah 14,2%, terdapat peningkatan

capaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak (sudah sesuai dengan target)

- Masih ada puskesmas belum memiliki ruang bermain anak yang memenuhi standar karena kondisi ruangan yang tidak memadai.
- SDM di Fasilitas Kesehatan sudah dilatih Konvensi Hak Anak masing masing 2 (dua ) orang per Puskesmas dari 7 (tujuh) Puskesmas.
- Rumah Sakit Achmad Mochtar adalah Rumah Sakit Sayang Bayi telah mendapatkan penghargaan tingkat nasional dan internasional tentang inovasi pelayanan public “BASABA” sebagai upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

16. Indikator 16 : Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak.

- Sudah ada Edaran No. 440/0385/II/DKK/2018 tentang Peningkatan Higiene Sanitasi Depot Air Minum
- Rumah Tangga dengan Akses Air Minum yang Layak sejumlah 87,31% tahun sebelumnya sejumlah 86,37%, menunjukkan adanya peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum yang Layak . Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan penyuluhan dari rumah ke rumah dan melakukan pemeriksaan laboratorium kualitas air.

17. Indikator 17 : Tersedia Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan Promosi dan Sponsor Rokok

- Dengan adanya Perda No. 1 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Perda No. 11 tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda No 1 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka tidak ada lagi Iklan Promosi dan Sponsor Rokok. Kawasan Tanpa Rokok sudah tersedia di fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas umum, fasilitas Ruang Bermain Anak, di tempat ibadah dan angkutan umum.

18. Indikator 18 : Persentase Wajib Belajar 12 Tahun

- Sudah ada Perda No. 6 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tertuang pada BAB V pasal 14 berbunyi setiap anak yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan menengah, namun belum dapat dilaksanakan sepenuhnya untuk tingkat SD dan SLTP tidak di pungut biaya pendidikan tetapi SLTA ada pemungutan biaya pendidikan.
- SDM Penyelenggara Program Wajib Belajar 12 tahun sudah dilatih konvensi hak anak.

19. Indikator 19 : Persentase Sekolah Ramah Anak

- Sekolah yang telah menginisiasi sekolah ramah anak sejumlah 57,2% sesuai dengan Keputusan Walikota No. 188.45-362-2018 tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak, tahun sebelumnya sejumlah 1,9% . Adanya peningkatan yang signifikan, adapun upaya yang telah dilakukan adalah Sosialisasi Sekolah Ramah Anak, Deklarasi Sekolah Ramah Anak, Outdoor Classroom Day (OCDay), Pelatihan Sekolah Ramah Anak dan Pelatihan Konvensi Hak Anak yang diikuti oleh Guru/Guru BK/Kepala Sekolah.
- Masih ada Guru/Guru BK/Kepala Sekolah yang belum terlatih Konvensi Hak Anak yang disebabkan karena keterbatasan anggaran. Untuk itu perlu mengadakan pelatihan Konvensi Hak Anak rutin setiap tahun sehingga semua pihak yang berhubungan dengan anak terlatih Konvensi Hak Anak dengan harapan hak anak dapat terpenuhi.

20. Indikator 20 : Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreatifitas dan Rekreatif yang Ramah Anak

- Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreatifitas dan Rekreatif sejumlah 26 buah yang tersebar di 24 Kelurahan namun belum semua fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreatifitas dan Rekreatif yang Ramah Anak karena masih ada Pengelola Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreatifitas dan Rekreatif yang belum terlatih Konvensi Hak Anak.

21. Indikator 21 : Peraturan Daerah/Kebijakan, Upaya Pencegahan, Penyediaan Layanan, Penguatan dan Pengembangan Lembaga.

- Perda no 4 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak BAB IV s.d BAB IX mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak.
- Penyediaan layanan UPTD belum ada, upaya yang telah dilakukan untuk usulan penyediaan layanan UPTD yaitu dengan menaikkan TS ke Walikota, setelah di Telaah perlu penyusunan SOTK baru, karena terdapat tumpang tindihnya tupoksi Bidang P2KPA dengan UPTD.
- Untuk melayani perempuan dan anak yang mengalami korban kekerasan di layani pada lembaga layanan P2TP2A yang difasilitasi dengan molin. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pelayanan pada P2TP2A yaitu membentuk dan melatih Satgas P2TP2A, kerjasama dengan Inspirasi Consulting untuk penanganan kasus dan melatih SDM lembaga layanan P2TP2A Konvensi Hak Anak..
- Sudah ada Tatalaksana Penanganan Kekerasan terhadap Anak di puskesmas dan UPPA

22. Indikator 22 : Situasi Darurat dan Pornografi (anak korban bencana dan konflik yang terlayani, HIV AIDS, dan NAPZA).

- Tidak ada terjadi bencana alam dan situasi konflik di Kota Bukittinggi namun untuk mencegah terjadinya korban saat terjadinya bencana alam Dinas Damkar telah melaksanakan sosialisasi tanggap bencana kepada anak-anak di lingkungan Kota Bukittinggi.
- Tercatat 8 orang anak korban pornografi di layani oleh lembaga layanan P2TP2A sedangkan untuk kasus napza dan HIV AIDS dilayani oleh puskesmas dengan layanan IPWL. Tidak terdapat anak yang terlibat NAPZA dan menderita HIV AIDS upaya yang telah dilakukan pada korban pornografi adalah pendampingan dan therapy psilogis Tidak terdapat anak yang terlibat NAPZA dan menderita HIV AIDS.

23. Indikator 23 a: Kasus Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan, Anak jaringan terorisme, anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tua yang terlayani.

- Dari 9 org anak yang berhadapan dengan hukum, anak yg berkonflik dengan hukum sejumlah 5 orang, 1 orang sudah di vonis bersalah sedang menjalani hukuman di LPKA tanjung pati 50 Kota, 1 org dalam proses penyelidikan, 3 orang dalam proses persidangan sementara pada tahun sebelumnya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sejumlah 2 orang yang diversi sejumlah 2 orang, ABH didampingi dan dilakukan therapy psikologis.

Indikator 23.b Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani, anak dengan sosial yang menyimpang.

- Belum ada sistim pencatatan dan pelaporan anak penyandang disabilitas, pencatatan anak disabilitas dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- Sarana dan prasarana public telah memperhatikan akses bagi anak penyandang disabilitas.
- Sudah ada pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dan apresiasi bagi anak penyandang disabilitas yaitu dengan melibatkan anak penyandang disabilitas dalam kepengurusan Forum Anak dan memfasilitasi untuk tampil pada peringatan Hari Anak Nasional.

- Sudah ada lembaga layanan bagi anak penyandang disabilitas seperti Yayasan Pembina Anak Cacat (YPAC), Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI), Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia dan FORKASI

24. Indikator 24 : Perlindungan anak dari KTA (Kekerasan, Penelantaran, Eksploitasi ekonomi (BPTA) dan sexual, Perdagangan serta kejahatan sexual.

- Belum ada peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

### 5.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra

Realisasi capaian Kota Layak Anak berdasarkan kategori dibandingkan dengan target akhir Renstra :

Tabel 5.3.1 Perbandingan antara Capaian Kota Layak Anak berdasarkan kategori Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra

Indikator	Realisasi tahun 2019	Target Renstra (2021)	Capaian terhadap Renstra
capaian Kota Layak Anak berdasarkan kategori	Madya	Madya	100%

Capaian Kota Layak Anak setelah dilakukan evaluasi sebanyak empat kali sudah mencapai target sesuai dengan Renstra dimana target Capaian Kota Layak Anak pada tahun 2021 adalah Madya. Untuk percepatan Kota Bukittinggi menjadi kota layak anak diperlukan koordinasi yang lebih baik dan terintegrasi serta adanya komitmen dari semua pihak.

### 5.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

pencapaian indikator Kota Layak Anak adalah komitmen pemerintah Kota Bukittinggi bersama-sama dengan SKPD pendukung dalam pemenuhan masing-masing klaster pengembangan Kota Layak Anak

Capaian MADYA lebih banyak disebabkan oleh adanya Inovasi Sekolah Keluarga yang dinilai benar benar baru, dan telah mengangkat posisi Bukittinggi dari Pratama ke Madya, namun dari segi indikator kinerja evaluasi Kota Layak Anak, Kota Bukittinggi masih jauh

dari harapan , karena Evaluasi Kota Layak Anak merupakan Evaluasi kinerja lintas SKPD yang dibuktikan dengan data dan dokumentasi , data yang sangat minim itu adalah data dari klaster III dan Klaster IV.

Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia Dinas P3APPKB tetap berupaya maksimal untuk peningkatan perolehan penghargaan Kota Layak Anak dengan :

- a. Mengadakan pelatihan Konvensi Hak Anak kepada SDM yang terkait pada setiap indikator.
- b. Mengembangkan Forum Anak dengan membentuk Forum Anak Kelurahan dan membina Forum anak agar aktif untuk menjalankan fungsinya sebagai pelopor dan pelapor sehingga dapat berkontribusi pada setiap indikator.
- c. Bermitra dengan SKPD lainnya dalam mengembangkan Kelurahan Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Ramah Anak, Ruang Bermain ramah anak.

### **5.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisa kinerja, pencapaian Madya untuk evaluasi Kota Layak Anak Tahun 2020, sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, tetapi apabila dibandingkan dengan capaian Kabupaten kota lainnya, capaian kita seharusnya dapat ditingkatkan minimal pada tingkatan NINDYA, hal ini lebih disebabkan oleh :

- a. dukungan anggaran yang jauh dari memadai
- b. sulitnya dukungan data dan dokumentasi pendukung dari SKPD tertentu , sehingga kinerja Kota Layak Anak tidak dapat dibuktikan .
- c. adanya beberapa kondisi yang memposisikan Bukittinggi terpapar tidak pro Hak Anak yaitu masih bebasnya iklan rokok di toko toko di area public
- d. lemahnya komitmen
- e. Kurangnya staf pendukung

Dengan segala keterbatasan diatas strategi penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran adalah dengan melakukan kerjasama dengan :

1. Bekerjasama dengan Kementerian PPA dari segi dukungan dana dan sumber daya manusia/expert KLA.
2. Memaksimalkan dukungan Dinas PPA Provinsi Sumatera Barat

3. Memaksimalkan dukungan Dinas Pendidikan
4. Dukungan CSR dan beberapa perusahaan.

### **5.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator**

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian Indikator sasaran **Capaian Kota Layak anak berdasarkan kategori** adalah sebagai berikut :

#### **Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah

Program Penguat Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 202.282.993,- dengan realisasi sebesar Rp. 201.446.339,- dan tingkat realisasi mencapai angka 99,59%.

##### **1) Pemenuhan Hak-Hak Anak**

Indikator kinerja kegiatan ini adalah peserta pelatihan dapat sertifikat dengan target 60 orang dengan alokasi dana sebesar Rp. 136.848.743,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 136.447.939,- dengan tingkat realisasi keuangan 99,71% dan capaian realisasi fisik 100%.

##### **2) Pembinaan Forum Anak Daerah (Forda)**

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah forum anak aktif dengan target 1 forum dan alokasi dana sebesar Rp. 5.567.750,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 5.567.750,- dengan tingkat realisasi keuangan 100% dan capaian realisasi fisik 100%.

##### **3) Perkuatan Perlindungan anak Terpadu Berbasik Masyarakat (PATBM)**

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah PATBM aktif dan terlatih dan alokasi dana sebesar Rp. 16.337.500,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 16.041.250,- dengan tingkat realisasi keuangan 98,19% dan capaian realisasi fisik 100%.

#### **Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**

Program Penguatan Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 3.109.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.095.000,- dan tingkat realisasi mencapai angka 99,55%.

### 1) Pelayanan dan Perlindungan Khusus Anak

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah Jumlah Anak yang mendapatkan pelayanan dan Perlindungan Khusus dan alokasi dana sebesar Rp. 3.109.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 3.095.000,- dengan tingkat realisasi keuangan 99,55% dan capaian realisasi fisik 100%.

## 6. Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif

Kasus kekerasan terhadap anak baik fisik, psikis, maupun seksual, akan sangat berdampak pada masa depan anak, baik terhadap kesehatan fisik dan terutama bagi perkembangan psikologis anak. Menurut World Report tentang Kekerasan dan Kesehatan (Runyan, et al, 2002 dalam Kurniasari, dkk, 2017) bahwa kekerasan atau penyiksaan anak “termasuk segala bentuk penyiksaan fisik dan/atau emosional, pelecehan seksual, mengabaikan atau kelalaian penanganan atau eksploitasi komersial atau lainnya, yang mengakibatkan bahaya yang aktual dan potensial bagi kesehatan anak, mampu untuk bertahan hidup, perkembangan dan harga diri dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Isu kekerasan terhadap anak belum mampu direspon secara optimal dengan kebijakan maupun program-program perlindungan anak yang komprehensif, kolaboratif, dan terpadu. Hasil Konsultasi Nasional dengan anak-anak tahun 2006 sebagai bagian dari Penelitian Global PBB, menyimpulkan bahwa anak-anak telah mengalami berbagai bentuk kekerasan baik verbal maupun fisik, serta seksual. Selanjutnya, di tahun 2011, Widodo, dkk melakukan penelitian di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas anak penghuni RPSA adalah korban pelecehan seksual, yang seringnya dilakukan oleh para ayah, ayah tiri, anggota keluarga lainnya, termasuk para guru dan tetangga.

Beberapa fakta yang ditemukan dari beberapa penelitian di atas, menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan isu nasional bahkan isu global, yang harus mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak. Anak sebagai generasi penerus, seharusnya dilindungi, dijaga, dan dibentuk agar menjadi manusia yang kelak bermanfaat dan berguna bagi bangsa dan negaranya. Tugas ini menjadi tanggungjawab semua lapisan masyarakat di mana anak-anak itu berada, terutama bagi Pemerintah selaku penyelenggara negara. Pemerintahan dari tingkat tertinggi hingga yang terendah memiliki beban dan porsi yang berbeda-beda dalam melaksanakan fungsi perlindungan terhadap anak.

Untuk itu, kehadiran Dinas P3APPKB yang secara formal mengemban misi perlindungan anak khususnya di Kota Bukittinggi telah berperan aktif dalam memaksimalkan upaya-upaya penanganan anak korban kekerasan. Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti UPPA Polres dan lembaga layanan anak yang memiliki visi misi terutama dalam menangani dan melayani anak korban kekerasan. Adapun kondisi kasus dilaporkan dan telah dilakukan pendampingan selama 3 (tiga) tahun terakhir, adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1  
Data Anak korban kekerasan  
di Kota Bukittinggi

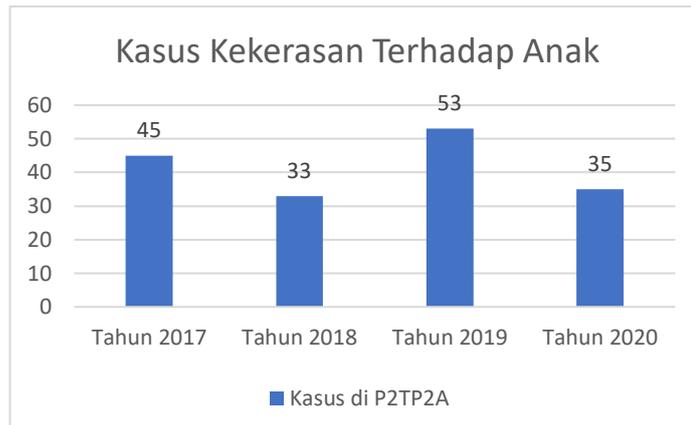
Tahun	Jumlah Anak korba kekerasan	Jumlah Anak korban kekerasan yang dilayani secara komprehensif	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif
2017	45	45	100%
2018	33	33	100%
2019	53	53	100%
2020	35	35	100%

Sumber data Dinas P3APPKB

Dari tabel di atas, terlihat terjadinya penurunan jumlah anak korban kekerasan dari tahun 2019. Fakta ini besar kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak. Masyarakat lebih memahami bahwa kekerasan yang pernah dialami oleh anak, akan berdampak jangka panjang. Dinas P3APPKB menyediakan sarana pelayanan bagi anak korban kekerasan sebagai bentuk Perlindungan Anak yang menjadi Korban Kekerasan. Layanan itu berupa pendampingan psikologis, sosial, hukum, dan spiritual)

Gambar 6.1

Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2020 dan 2 tahun terakhir  
Di Kota Bukittinggi



### 6.1 Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif

Dari jumlah kasus yang dilaporkan masyarakat Kota Bukittinggi sepanjang tahun 2020, dapat dihitung Persentase Anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif dengan membandingkan "jumlah anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif dengan jumlah anak korban kekerasan dikalikan dengan 100"

*Persentase Anak Korban Kekerasan Yang mendapat Layanan Komprehensif*

$$= \frac{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif}}{\text{Jumlah anak korban kekerasan}} \times 100$$

$$= \frac{35}{35} \times 100 = 100\%$$

Tabel 6.1.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja Persentase Anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Tahun 2020 Persentase Anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif adalah

sebesar 100%, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2020 mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2020.

## 6.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator Persentase Anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif dibandingkan dengan capaian 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Persentase Anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif Tahun 2020 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Persentase Anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Tahun 2017	100%	100%	100%
Tahun 2018	100%	100%	100%
Tahun 2019	100%	100%	100%
Tahun 2020	100%	100%	100%

## 6.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra

Realisasi Persentase Anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif dibandingkan dengan target akhir Renstra :

Tabel 6.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapat layanan komprehensif Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra

Indikator	Realisasi tahun 2020	Target Renstra (2021)	Capaian terhadap Renstra
Persentase Anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	100%	100%	100%

Pada table diatas Persentase anak korban yang mendapat layanan komprehensif adalah sebesar 100% yang sudah mencapai target akhir Renstra.

#### **6.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan pencapaian indikator layanan anak korban kekerasan secara komprehensif melalui peningkatan peran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Masalah anak pada tingkat kelurahan selaku perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan penjangkauan dan pendampingan pertama terhadap permasalahan anak dilingkungan Kelurahannya masing-masing. Dinas P3APKB telah melakukan :

1. peningkatan kapasitas satgas penanganan masalah anak dengan menyelenggarakan pelatihan sebanyak 20 JP. Dalam pelatihan tersebut Satgas dibekali keterampilan untuk :
  - a. Kemampuan Mengenal dan Mengelola Diri Sendiri dalam rangka membentuk kemampuan pengambilan keputusan serta menetapkan cara-cara yang efektif dalam mencapai tujuan.
  - b. Kemampuan Mengenal dan Mengelola Lingkungan Sosial, sehingga mampu memenuhi prinsip umum pelayanan salah satunya berempati kepada korban kekerasan, berkomunikasi, mengelola konflik, mampu mengarahkan, menjalin ikatan, serta berkolaborasi.
  - c. Kemampuan Pendampingan Mandiri.
2. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD), khusus untuk kaum laki-laki/bapak-bapak di beberapa kelurahan di Kota Bukittinggi. Kegiatan ini telah terlaksananya di 4 (empat) Kelurahan, yakni Kelurahan Pakan Kurai, Belakang Balok, Tarok Dipo, Kelurahan Puhun Tembok. Kegiatan ini mendapatkan respon positif dari para lelaki/bapak.
3. Kampanye bersama lindungi anak (Berlian) ke sentra-sentra orang dewasa yang memiliki anak dan rentan kekerasan terhadap anak.
4. Menjadikan isu penyebab KDRT terhadap anak sebagai materi utama di sekolah keluarga

#### **6.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dinas P3APKB dibantu oleh :

1. Satuan Tugas (Satgas) penanganan masalah anak di Kelurahan yang berasal dari masyarakat, dan direkomendasikan oleh lurah setempat, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota, dengan masa bakti 3 (tiga) tahun. Tugas Satgas Kelurahan adalah melakukan :
  - a. Penjangkauan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
  - b. Melakukan penanganan awal atas permasalahan yang dilaporkan masyarakat melalui satgas.
  - c. Mendampingi korban kekerasan saat dirujuk ke Dinas P3APKB.
2. Adanya dukungan tenaga KIE untuk pencegahan kekerasan terhadap anak dari Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Sosial, Kemenag dan Dinas Pendidikan.
3. Adanya kader Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) di seluruh Kelurahan

#### **6.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator**

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator Persentase Anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif adalah sebagai berikut :

##### **Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 434.788.296,- dengan realisasi sebesar Rp. 432.991.048,- dan tingkat realisasi mencapai angka 99,59%.

##### **2) Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Penanganan dan pendampingan korban pasca kekerasan dengan target 1 lembaga, 40 kasus dan alokasi dana sebesar Rp. 152.950.285,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 151.586.559,- dengan tingkat realisasi keuangan 99.11% dan capaian realisasi fisik 100%.

## TUJUAN II : TERKENDALINYA JUMLAH PENDUDUK

Sesuai Penetapan Kinerja Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi Tahun 2020, tujuan ini dicapai melalui 2 sasaran strategis yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi. Adapun sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

### Sasaran II.1 Meningkatnya Kualitas Program Keluarga Berencana

Capaian sasaran strategis II.1 ini diukur berdasarkan capaian terhadap 2 Indikator Kinerja Utama seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.2  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran II.1  
Meningkatnya Kualitas Program Keluarga Berencana

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	65,6	68,08	103,78
2	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rates/ ASFR 15-19).	90	7,52	191,64

Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **memuaskan**.

## 7. CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE (CPR)

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk wanita kawin atau wanita yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja.

Contraceptive Prevalence Rate (CPR) merupakan perbandingan jumlah peserta KB aktif dengan jumlah pasangan usia subur kemudian hasilnya dikali 100. Pada tahun 2020 jumlah peserta KB aktif adalah sebanyak 11.072 orang sementara jumlah pasangan usia subur adalah 16.263 orang.

### 7.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

$$CPR = \frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia subur}} \times 100 = \frac{11.072}{16.263} \times 100 = 68,08\%$$

Tabel 7.1.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja Contraceptive Prevalence Rate (CPR) tahun 2020

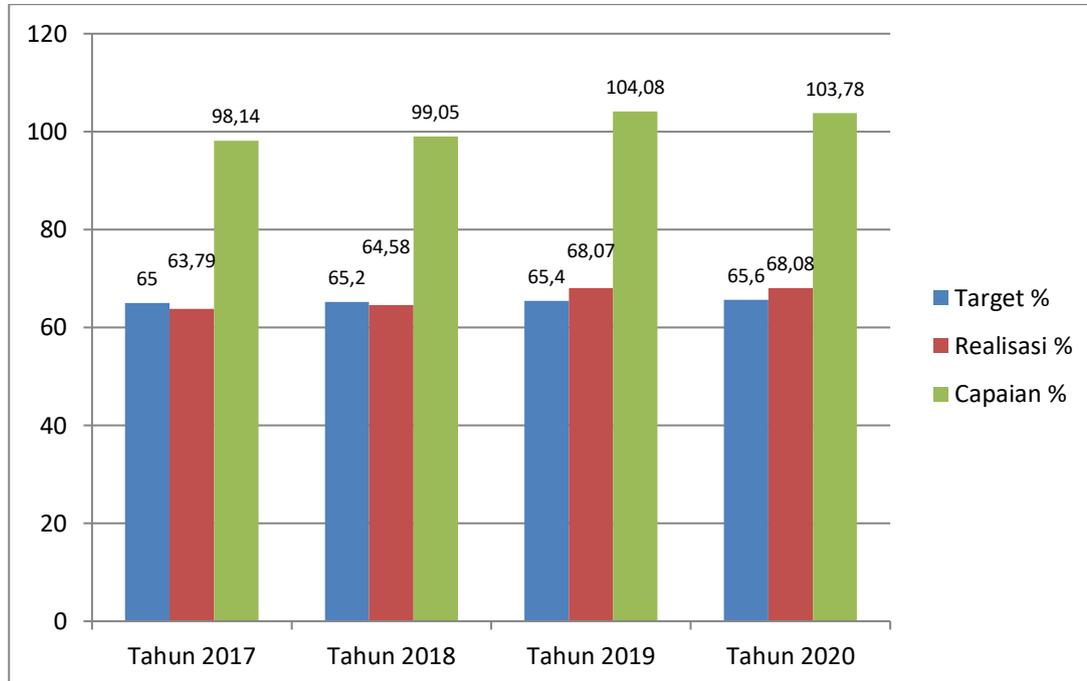
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	65,6%	68,08%	103,78 %

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut Contraceptive Prevalence Rate (CPR) pada tahun 2020 sebesar 68,08% melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 65,6%.

Capaian CPR tahun 2020 mencapai 68,08 % itu merupakan pencapaian maksimal Kota Bukittinggi. Capaian CPR tahun 2020 jika dibanding dengan capaian 2 tahun terakhir menunjukkan bahwa persentase capaian CPR pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Gambar 7.1.1

Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan 3 (tiga) tahun terakhir  
Indikator Sasaran Contraceptive Prevalence Rate (CPR)



## 7.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dibandingkan dengan capaian 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Tahun 2020 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	65 %	63,79%	98,14%
2018	65,2%	64,58%	99,05%
2019	65,4	68,07	104,08
2020	65,6%	68,08%	103,78%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat capaian CPR setiap tahun meningkat, dimulai dari tahun 2019 dan tahun 2020. Capaian kinerja CPR diatas merupakan

kontribusi pelaksanaan Komunikasi, informasi dan edukasi yang intens dilakukaukan melalui mobil penerangan KB dan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di gudang Dinas P3APPKB dengan SOP manajemen gudang yang baik.

### 7.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra

Realisasi capaian Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dibandingkan dengan target akhir Renstra :

Tabel 7.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra

Indikator	Realisasi tahun 2020	Target Renstra (2021)	Capaian terhadap Renstra
Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	68,08%	66%	103,15

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target akhir Renstra *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)* adalah sebesar 66% dan pada tahun 2020 telah melebihi target Renstra dengan realisasi sebesar 68,08 %.

Kekhawatiran Baby boom pada saat pandemic covid 19 ternyata tidak terjadi, hal ini di sumbangkan oleh banyaknya perkawinan pertama yang ditunda dan menunda kehamilan pertama.

### 7.4 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional

Tabel 7.4.1 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan standar Nasional

No	Uraian	Realisasi tahun 2020	Rata – rata Nasional	Capaian
1	Contraceptive prevalence rate (CPR)	68,08%	69,69%	97,69%

Capaian Contraceptive prevalence rate (CPR) pada tahun 2020 dibandingkan dengan rata-rata CPR Nasional mencapai 97,69%. Capaian yang sangat baik ini merupakan dukungan :

1. Tenaga fungsional PKB

2. Institusi Masyarakat Perkotaan
3. Faskes Pertama
4. Adanya rumah sakit rujukan
5. Jumlah Nakes cukup memadai
6. Adanya program Manunggal KB Kes (IpeKB, TNI, IBI, dan TP.PKK)

#### **7.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Capaian Contraceptive prevalence rate (CPR) pada tahun 2020 terhadap target kinerja tahun 2020 mencapai 103,78 %.

Penyebab keberhasilan antara lain :

- a. Gerakan sejuta akseptor
- b. KIE di kampung KB
- c. Ketersediaan Alat Obat Kontrasepsi

#### **7.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi mengupayakan kinerja CPR dengan strategi sebagai berikut :

- Menggandeng Sumber daya manusia Dinas Kesehatan
- Menggandeng beberapa SDM dari lembaga mitra seperti : IBI, IDI, TNI dan kader PKK.
- Menggandeng Sumber daya manusia humas Pemerintah Kota Bukittinggi.
- Menggerakkan pilar utama Institusi masyarakat perkotaan.

### **8. Age Specific Fertility Rates (ASFR)**

Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFR) adalah jumlah kelahiran hidup oleh ibu pada golongan umur 15 – 19 tahun yang dicatat selama satu tahun per 1.000 penduduk wanita pada golongan umur tertentu pada tahun yang sama.

Di antara kelompok perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) terdapat variasi kemampuan melahirkan, karena itu perlu dihitung tingkat fertilitas perempuan pada tiap-

tiap kelompok umur (age specific fertility rate). Angka ini menunjukkan banyaknya kelahiran menurut umur wanita yang berada dalam kelompok umur antara 15-49 tahun per wanita pada kelompok umur yang sama. Dengan demikian semakin banyak ibu yang berada di suatu kelompok umur tersebut, akan lebih memungkinkan kelompok umur tersebut memiliki angka kelahiran yang lebih tinggi. Perhitungan fertilitas menurut golongan umur biasanya dilakukan dengan interval 5 tahun hingga bila wanita dianggap usia subur terletak antara umur 15-49 tahun, akan di peroleh sebanyak 7 golongan umur. Dengan demikian dapat di susun menjadi distribusi frekuensi pada setiap golongan umur. Dari distribusi frekuensi tersebut, dapat diketahui pada golongan umur berapa yang mempunyai tingkat kesuburan tertinggi. Hal ini penting untuk menentukan prioritas program keluarga berencana.

Pembangunan penduduk usia remaja merupakan sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi pada remaja, mengakibatkan banyak terjadi perkawinan di bawah usia 20 tahun. Untuk tahun 2020, berdasarkan data Dinas Capil, jumlah perempuan berusia 15-19 tahun adalah sebanyak 7.443 jiwa dan jumlah anak yang lahir dari perempuan berusia 15 – 19 tahun adalah sebanyak 55,95 kelahiran (data dari DKK).

### 8.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Dengan demikian, data ASFR (15 – 19 tahun) dihitung dengan :

$$\begin{aligned}
 & \text{ASFR (15 – 19)} \\
 &= \frac{\text{Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15 – 19}}{\text{Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15 – 19 pada pertengahan tahun yang sama}} \times k \\
 &= \frac{55,95}{7.443} \times 1.000 = 7,52
 \end{aligned}$$

Bi = Jumlah kelahiran bayi dari wanita pada kelompok umur i

Pi = Jumlah perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun

K = bilangan konstan, 1000

Tabel 8.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Age Spesific Fertility Rates (ASFR) tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Age Spesific Fertility Rates (ASFR)	90	7,52	191,64

Dari data di atas, ASFR tahun 2020 adalah sebesar 7,52 artinya dalam 1000 orang perempuan berumur 15 – 19 tahun yang melahirkan anak sebanyak 7 s.d 8 orang. Faktanya remaja perempuan berumur 15 – 19 tahun sudah memahami kesehatan reproduksi sehingga tingkat pernikahan di usia anak cukup rendah.

### 8.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator Age Spesific Fertility Rates (ASFR) dibandingkan dengan capaian 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 8.2.1 Perbandingan antara Capaian Age Spesific Fertility Rates (ASFR) Tahun 2020 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Age Spesific Fertility Rates (ASFR)		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2016			
2017	96	96,04	100%
2018	94	6,52	144,10%
2019	92	0,54	199,41%
2020	90	7,52	191,64%

### 8.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra

Realisasi capaian Age Spesific Fertility Rates (ASFR) dibandingkan dengan target akhir Renstra :

Tabel 8.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Age Spesific Fertility Rates (ASFR) Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra

Indikator	Realisasi tahun 2020	Target Renstra (2021)	Capaian terhadap Renstra
Age Spesific Fertility Rates (ASFR)	7,52	89	191,55%

Berdasarkan tabel ASFR diatas, capaiannya sudah melebihi target Renstra tahun 2021, dimana pada tahun 2021 perempuan berusia 15 – 19 tahun diprediksi 89 orang yang akan melahirkan dalam 1.000 orang perempuan berusia 15 – 19 tahun. Kinerja capaian ASFR pada tahun 2020 sebesar 7,52 yang artinya dari 1.000 Perempuan berusia 15 – 19 tahun yang melahirkan 7 s.d 8 orang. Kondisi ini merupakan keberhasilan bersama Pemerintah Kota Bukittinggi.

#### **8.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

1. Merupakan program prioritas Nasional
2. Adanya PIK R jalur Pendidikan dan Jalur Masyarakat
3. Aktifnya Bina Keluarga Remaja
4. Adanya Program Duta Generasi Berencana
5. Adanya program Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) melalui berbagai media

#### **8.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

1. Memaksimalkan peran remaja
2. Meningkatkan Keterampilan remaja dan keluarga remaja serta kader
3. Mengefektifkan sumber dana APBD dan APBN

**Sasaran II.2 Terwujudnya Pemanduan dan Sinkronisasi kebijakan Pembangunan Pengendalian Penduduk**

Pencapaian sasaran strategis II.2 ini diukur berdasarkan capaian terhadap Indikator Kinerja Utama seperti pada tabel berikut :

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Total Fertility Rate (TFR)	2,52	2,55	98,81%

## 9. Total Fertility Rate (TFR)

TFR adalah jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang perempuan pun yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran. TFR merupakan pengukuran yang menyatakan fertilitas pada akhir masa reproduksi dari suatu kohor perempuan. Keunggulan TFR adalah angka ini dapat dijadikan ukuran kelahiran untuk seorang perempuan selama masa reproduksinya dan telah memperhitungkan tingkat kesuburan perempuan pada masing-masing kelompok umur.

### 9.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

TFR = Jumlah anak yang akan dipunyai seorang perempuan selama masa reproduksinya per 1.000 Perempuan  
= 2,55

Tabel 9.1.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja Total Fertility Rate (TFR) tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Total Fertility Rate (TFR)	2,52	2,55	98,81%

Dari data di atas, TFR tahun 2020 adalah sebesar 2,55 artinya dalam 1000 orang perempuan yang melahirkan sebanyak 2 sampai 3 orang anak.

## 9.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator Total Fertility Rate (TFR) dibandingkan dengan capaian 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 9.2.1 Perbandingan antara Capaian Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2020 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Total Fertility Rate (TFR)		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	2,56	2,68	95,31%
2018	2,55	2,60	98,04%
2019	2,49	2,52	98,80%
2020	2,52	2,55	98,81%

## 9.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra

Realisasi capaian Total Fertility Rate (TFR) dibandingkan dengan target akhir Renstra :

Tabel 1.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra

Indikator	Realisasi tahun 2020	Target Renstra (2021)	Capaian terhadap Renstra
Total Fertility Rate (TFR)	2,55	2,52	98,81%

Berdasarkan tabel diatas Total Fertility Rate (TFR) sudah sangat baik dan perlu di pertahankan.

## 9.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Optimalnya pelaksanaan Komunikasi, informasi dan edukasi oleh kader
2. Harmonisasi Nakes dan PKB
3. Tersedianya alat dan Obat Kontrasepsi

4. Tersedianya sarana pelayanan dengan standar yang baik

### **9.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

1. Memanfaatkan kader, tokoh agama dan tokoh masyarakat
2. Menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan
3. Menjalin kerjasama dengan Organisasi Profesi

### **9.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator**

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan Terkendalinya Jumlah Penduduk adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Keluarga Berencana**

Program Keluarga Berencana bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil yang bahagia sejahtera. Program Keluarga Berencana juga bertujuan memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, keluarga dan bangsa, dan akan berdampak kepada penurunan angka kematian ibu dan anak, meningkatnya Pasangan Usia Subur yang ber KB dan menurunnya angka kelahiran (Total fertility Rate)

Program Keluarga Berencana, mendapat alokasi dana sebesar Rp. 1.847.775.172,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.814.387.423,- dan tingkat realisasi mencapai angka 98,19%

#### **1) Operasional Distribusi Alokasi (DAK Non Fisik 2020 BOKB)**

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah Alokasi terdistribusi dengan target 597 IUD, 243 Implant, 1.020 Suntik, 298 Pil, 223 Kondom dengan alokasi dana sebesar Rp. 26.444.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.527.200,- dengan tingkat realisasi keuangan 73,84% dan capaian realisasi fisik 100 %.

#### **2) Pelaksanaan KIE / Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS**

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah KIE yang dilaksanakan melalui media cetak maupun elektronik dengan target 24 Kelurahan dan 2 kali liputan elektronik dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.360.250,- terealisasi sebesar Rp. 3.200.500,- dengan tingkat realisasi keuangan 92,25% dan capaian realisasi fisik 100 %.

#### **3) Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi**

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Bakti Sosial Pelayanan KB (3 Kegiatan), Jumlah akseptor yang dilayani KB (1.700 akseptor), Jumlah klinik yang melayani

KB (24 klinik), Jumlah akseptor IUD-Implant yang di KIE kader (120 akseptor) dan Jumlah Advokasi dan KIE Kespro (6kali) dengan alokasi dana sebesar Rp. 101.577.711,- terealisasi sebesar Rp. 85.978.239,- dengan tingkat realisasi keuangan 84,64% dan capaian realisasi fisik 100 %.

**4) Penyuluhan Keluarga Berencana Berbasis Kader**

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah Kader yang melaksanakan penyuluhan dengan target 24 PPKBK, 165 Sub PPKBK dan 85 Kelompok kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 573.134.711,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 571.218.989,- dengan tingkat realisasi keuangan 99,67% dan capaian realisasi fisik 100%.

**5) Pelaksanaan Kampung KB**

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah kampung KB yang memenuhi indikator kampung KB dengan target 6 kampung KB dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.527.500,- dapat terealisasi sebesar Rp. 4.354.750,- dengan tingkat realisasi keuangan 78,78% dan capaian realisasi fisik 100 %.

**6) Pengelolaan Bina Keluarga Sejahtera**

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Pembinaan dan pengembangan Bina Keluarga Sejahtera dengan target 23 kelompok dan Fasilitasi Asosiasi kelompok UPPKS (AKU) dengan target 1 lembaga dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.197.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 20.197.000,- dengan tingkat realisasi keuangan 100% dan capaian realisasi fisik 100%.

**7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh KB (DAK Fisik Bidang Kesehatan Keluarga Berencana)**

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah sarana dan prasarana Penyuluh KB terbeli dengan target 12 Jenis dengan alokasi dana sebesar Rp 285.670.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 284.199.000,- dengan tingkat realisasi keuangan 99,49% dan capaian realisasi fisik 100%.

**8) Operasional Penyuluh KB Bantuan Penyuluh Keluarga Berencana (DAK Non Fisik 2020 BOKB)**

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Operasional Penyuluh KB dengan target 3 Balai penyuluh dengan alokasi dana sebesar Rp 321.168.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 316.855.200,- dengan tingkat realisasi keuangan 98,66% dan capaian realisasi fisik 100%.

9) **Operasional Integrasi Program KKBK dan Program Lainnya di Kampung KB (DAK Non Fisik 2020 BOKB)**

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Kampung KB yang dibina dengan target 6 kampung KB dengan alokasi dana sebesar Rp. 248.106.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 247.384.795,- dengan tingkat realisasi keuangan 99,71% dan capaian realisasi fisik 100 %.

10) **Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB Operasional Penyuluhan KB Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik 2020 BOKB)**

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB dengan target 100% dengan alokasi dana sebesar Rp. 118.590.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 117.471.750,- dengan tingkat realisasi keuangan 99,06% dan capaian realisasi fisik 100%.

11) **Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader PPKBD dan Sub PPKBD (DAK Non Fisik 2020 BOKB)**

Indikator kinerja kegiatan ini jumlah PPKBK dan sub PPKBK aktif dengan target 48 orang dengan alokasi dana sebesar Rp. 144.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 144.000.000,- dengan tingkat realisasi keuangan 100% dan capaian realisasi fisik 100 %.

2. **Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri**

Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Kesehatan Reproduksi, sehingga program pelayanan KB didorong untuk dapat dimanfaatkan pasangan usia subur, untuk menekan angka kematian Ibu dan angka kematian Anak serta penduduk tumbuh seimbang, kegiatan ini terus menerus dikampanyekan dan di berikan penyuluhan oleh para kader PPKBK dan SUB PPKBK, termasuk didalamnya pembinaan kelompok kegiatan baik kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia, sedangkan kegiatan kesehatan Reproduksi bertujuan, memberikan pemahaman kepada remaja dan masyarakat yang memiliki remaja, untuk memastikan remaja, berperilaku sehat dan siap memasuki perkawinan yang direncanakan . Selanjutnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga, melalui pembinaan usaha kelompok ibu ibu ber KB serta menyediakan informasi performa keluarga.

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 173.924.025,- dengan realisasi sebesar Rp. 169.698.245,- dan tingkat realisasi mencapai angka 97,57%

**1) Pendataan Keluarga**

Indikator kinerja kegiatan ini jumlah peserta orientasi pendataan, pencatatan dan pelaporan, jumlah peserta sarasehan (200 orang) dan Jumlah KK yang terdata (26.000 KK) dan alokasi dana sebesar Rp. 170.763.900,- dan dapat terialisasi sebesar Rp. 166.671.995,- dengan tingkat realisasi keuangan 97,60% dan capaian realisasi fisik 100%.

**2) Koordinasi Koalisi Kependudukan**

Indikator kinerja kegiatan ini jumlah rekomendasi kependudukan dengan target 2 Analisa dan alokasi dana sebesar Rp. 630.000,- dan dapat terialisasi sebesar Rp. 630.000,- dengan tingkat realisasi keuangan 100% dan untuk capaian fisik belum dapat direalisasikan karena kegiatan ini difokuskan dalam rangka penanganan pandemic covid 19.

**3) Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)**

Indikator kinerja kegiatan ini jumlah Grand design tersedia dengan target grand design dan alokasi dana sebesar Rp. 2.530.125,- dan dapat terialisasi sebesar Rp. 2.396.250,- dengan tingkat realisasi keuangan 94,71%, untuk capaian fisik belum dapat direalisasikan karena kegiatan ini difokuskan dalam rangka penanganan pandemic covid 19.

**3. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR**

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 61.067.500,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 60.507.610,- dan tingkat realisasi mencapai angka 99,08%.

**1) Pembinaan Pusat Informasi Konseling Remaja dan Generasi Berencana**

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Fasilitasi Generasi Berencana dengan target 1 forum dengan alokasi dana sebesar Rp. 61.067.500,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 60.507.610,- dengan tingkat realisasi keuangan 99,08% dan capaian realisasi fisik 100%.

Pencapaian tujuan II sudah baik, hal ini disebabkan oleh program yang dilaksanakan sudah dari hulu sampai hilir, dimulai dengan kampanye program Kependudukan Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga ( KKBPK ) melalui mobil penerangan KB , penyuluhan langsung oleh kader, membuat kelompok kelompok kegiatan agar memudahkan masyarakat sasaran, dukungan puskesmas, ketersediaan alokon , dukungan mitra seperti babinsa, Ikatan Bidan Indonesia ( IBI) dan TP PKK, serta pelibatan semua unsur yaitu kelompok remaja, pemuka masyarakat, pemuka agama dan dukungan pimpinan

### 3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi melaksanakan 10 program yang dijabarkan kedalam 42 ( Empat Puluh Dua ) kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 3.380.250.252,- diantaranya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB sebesar Rp. 1.143.978.000 (33,84% dari APBD) yang terdiri dari DAK Non fisik 858.308.000 dan DAK fisik 285.670.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 3.314.156.260 atau 98,04 %

Rincian aspek keuangan Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Bukittinggi dapat di lihat dalam tabel sbb:

No	URAIAN	ANGGARAN		
		JUMLAH(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
1.	Pendapatan	0	0	0
2.	Belanja	7.622.181.563,-	7.243.217.574,-	<b>95,03</b>
	- Tidak langsung	4.241.931.311,-	3.929.021.314,-	92,62
	- Langsung	3.380.250.252,-	3.314.156.260,-	98,04

Rincian Anggaran perprogram dan kegiatan dapat dilihat dari rincian di bawah ini :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	DANA (ANGGARAN) (Rp)		
		TERSEDIA	REALISASI	%
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
1	Penyediaan jasa Surat menyurat	2.250.000	2.025.000	90,00%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	42.000.000	29.421.917	70,05%
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	218.811.911	212.690.522	97,20%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.707.500	3.601.000	97,13%

5	Penyediaan alat tulis kantor	7.999.000	7.988.000	99,86%
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.000.000	12.966.750	99,74%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.489.500	1.950.000	78,33%
8	Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000	9.922.560	99,23%
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	97.000.000	96.788.410	99,78%
10	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan Kantor	7.500.000	7.475.000	99,67%
11	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah	2.400.000	2.400.000	100,00%
12	Penyediaan jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	5.000.000	3.950.000	79,00%
		412.157.911	391.179.159	94,91%
<b>II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
13	Pengadaan Peralatan Kantor	39.150.000	38.188.000	97,54%
14	Pemeliharaan rubin/berkala gedung kantor	43.264.711	43.247.989	99,96%
		82.414.711	81.435.989	98,81%
<b>III Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				
15	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	13.800.000	13.622.000	98,71%
<b>IV Program Kesenjangan Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>				
16	Pelayanan dan perlindungan khusus anak	3.109.000	3.095.000	99,55%
<b>V Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>				
17	Kelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	32.008.250	31.980.650	99,91%
18	Pengelolaan Data Gender dan Anak	11.520.750	11.408.750	99,03%
19	Perkuatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	16.337.500	16.041.250	98,19%
20	Pemenuhan Hak-hak Anak	136.848.743	136.447.939	99,71%
21	Pembinaan Forum Anak Daerah (Forda)	5.567.750	5.567.750	100%
		202.282.993	201.446.339	100%
<b>VI Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>				
22	Pelayanan Perempuan dan Anak korban kekerasan	152.950.285	151.586.559	99,11%

	23	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga	280.852.211	280.418.689	99,85%
	24	KIE dan Advokasi Jelajah Three End	985.800	985.800	100%
			434.788.296	432.991.048	100%
<b>VII</b>	<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>				
	25	Perkuatan Organisasi Perempuan	19.408.000	19.303.200	99,46%
	26	Penyelenggaraan, Pembinaan, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	112.358.644	109.398.247	97,37%
	27	Pembinaan dan pengembangan Ekonomi Perempuan	17.164.000	17.092.000	99,58%
			148.930.644	145.793.447	97,89%
<b>VIII</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>				
	28	Operasional Distribusi Alokasi (DAK Non Fisik 2020 BOKB)	26.444.000	19.527.200	73,84%
	29	Pelaksanaan KIE / Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS	3.360.250	3.200.500	95,25%
	30	Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi	101.577.711	85.978.239	84,64%
	31	Penilaian dan Penghargaan KB teladan	0	0	0,00%
	32	Penyuluhan Keluarga Berencana Berbasis Kader	573.134.711	571.218.989	99,67%
	33	Pelaksanaan Kampung KB	5.527.500	4.354.750	78,78%
	34	Pengelolaan Bina Keluarga Sejahtera	20.197.000	20.197.000	100%
	35	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh KB (DAK Fisik Bidang Kesehatan Keluarga Berencana)	285.670.000	284.199.000	99,49%
	36	Operasional Penyuluh KB Bantuan Penyuluh Keluarga Berencana (DAK Non Fisik 2020 BOKB)	321.168.000	316.855.200	98,66%
	37	Operasional Integrasi Program KKBK dan Program Lainnya di Kampung KB (DAK Non Fisik 2020 BOKB)	248.106.000	247.384.795	99,71%
	38	Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB Operasional Penyuluhan KB Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik 2020 BOKB)	118.590.000	117.471.750	99,06%
	39	Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader PPKBD dan Sub PPKBD (DAK Non Fisik 2020 BOKB)	144.000.000	144.000.000	100%
			1.847.775.172	1.814.387.423	98%
<b>IX</b>	<b>Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR yang Mandiri</b>				
	40	Pendataan Keluarga	170.763.900	166.671.995	97,60%

	41	Koordinasi Koalisi Kependudukan	630.000	630.000	100%
	42	Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	2.530.125	2.396.250	94,71%
			173.924.025	169.698.245	97,57%
<b>X</b>	<b>Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR</b>				
	43	Pembinaan Pusat Informasi Konseling Remaja dan Generasi Berencana	61.067.500	60.507.610	99,08%

### 3.5 Permasalahan dalam Pencapaian Sasaran dan Rekomendasi Perbaikan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah sebagai berikut :

1. Kecilnya dukungan anggaran, sehingga kualitas kegiatan tidak maksimal
2. Jumlah staf yang sangat sedikit, sehingga ada 8 (delapan) kepala seksi yang tidak memiliki staf , berdampak kepada kualitas hasil pekerjaan dan kualitas waktu penyelesaian pekerjaan
3. Kualitas SDM yang belum maksimal
4. Dukungan data dan dokumentasi dari SKPD terkait lemah, sehingga evaluasi kinerja yang dilakukan Pemerintah pusat, sering kali memosisikan Pemerintah Kota Bukittinggi belum baik
5. Belum diakomodirnya Unit Pelayanan Teknis Penanganan kasus KDRT terhadap perempuan dan anak pada Struktur Dinas P3APPKB, sehingga berdampak kepada belum maksimalnya penanganan kasus perempuan dan anak
6. Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan KB, tidak sesuai dengan jumlah kelurahan

#### Kendala yang dihadapi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menghadapi berbagai kendala antara lain :

1. Tidak dibayarkan transport masyarakat di beberapa kegiatan yang tidak ada dukungan anggaran masih mempengaruhi kualitas kegiatan.
2. Tidak diikutkannya pemuka masyarakat pada saat pengambilan penghargaan lomba, mendapat kritikan dari pemuka masyarakat, namun dipihak dinas dukungan anggaran untuk pemuka masyarakat tidak tersedia
3. Tidak adanya penghubung / atap antara kantor bagian depan ( sekretariat ) dengan kantor bagian belakang ( ruang bidang bidang ), menyebabkan pelaksanaan kegiatan teknis dan keadministrasian disaat hujan, total terhenti

4. Tidak adanya rumah penjaga malam
5. Tidak adanya Satpam Dinas

### **Strategi pemecahan masalah**

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dan permasalahan dalam pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi, dilakukan berbagai upaya sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi.
2. Merekrut tenaga Non ASN
3. Membentuk Pokja data dengan Keputusan Walikota
4. Mengusulkan pembentukan UPTD ke Pimpinan
5. Mengusulkan penambahan PLKB ke Perwakilan BKKBN Propinsi Sumbar
6. Membentuk Klinik Keuangan internal dinas
7. Mengusulkan atap penghubung
8. Mengusulkan rehab rumah jaga
9. Mengusulkan dukungan anggaran satpam
10. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk melihat kelemahan yang perlu diperbaiki dan sejauh mana pencapaian sasaran yang telah dilakukan.

Selanjutnya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi pada masa yang akan datang perlu strategi antara lain :

- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada melalui pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh Pemerintah Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat sehingga setiap pegawai dan PPTK mengerti dan paham dengan sasaran yang hendak dicapai dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.
- Pemanfaatan fasilitas kantor secara *efektif*.
- Kegiatan yang tidak terlaksana < 70 % akan menjadi kajian dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang.
- Perlu Pengangkatan Pejabat Fungsional PLKB

### 3.6 USULAN DAN HARAPAN

Usulan dan harapan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pencapaian target kinerja pada tahun yang akan datang agar berjalan efektif dan efisien yaitu :

- Dalam penetapan pagu anggaran, kiranya betul-betul memperhatikan Renja awal SKPD yang merupakan penyusunan Program dan kegiatan yang prioritas bagi SKPD.
- Proses Anggaran perubahan agar dipercepat, agar SKPD punya waktu merealisasikan
- Dalam pembahasan anggaran dilengkapi dengan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) untuk kegiatan yang memiliki Gap keadilan dan kesetaraan yang tinggi.
- Perlunya penyampaian presentasi kegiatan prioritas SKPD dihadapan pimpinan, tidak sebatas SKPD strategis
- Mengharapkan pola, semua urusan penting, agar dapat mengakomodir kegiatan prioritas seluruh SKPD

### 3.7 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi telah memperoleh penghargaan dan prestasi sebagai berikut :

Tabel 3.30

Daftar Prestasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Tahun 2020

NO	URAIAN PRESTASI	NAMA PEMENANG (Perorangan/Tim/lem baga)	TINGKAT PRESTASI (Provinsi/Nasional /Regional/Internas ional)	KET (Deskripsi Prestasi)
1	Inovasi Pelayanan Publik Sekolah Keluarga dari Kemen PAN-RB	Walikota Bukittinggi	Nasional	TOP'99 Inovasi Pelayanan Publik Sekolah Keluarga dari Kemen PAN-RB

2	Penghargaan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Pelaporan (SIMEP) dari Kemen PPPA-RI	Walikota Bukittinggi	Nasional	
3	Penobatan Ayah GenRe Kategori Kreator dari BKKBN Sumbar	Pusat Informasi Koseling Remaja Humaira Bukittinggi	Provinsi	
4	Ajang Kreatifitas GenRe dari BKKBN	Forum Generasi Berencana Kota Bukittinggi	Provinsi	Juara II Ajang Kreatifitas GenRe dari BKKBN
5	Pemilihan Duta Generasi Berencana dari BKKBN	Forum Generasi Berencana Kota Bukittinggi	Provinsi	Juara III Pemilihan Duta Generasi Berencana dari BKKBN
6	Lomba Gerakan PKK	Ketua TP.PKK Kota Bukittinggi	Provinsi	Juara Umum Lomba Gerakan PKK
7	Lomba Kelompok Dasa Wisma Berprestasi	Ketua TP.PKK Kota Bukittinggi	Provinsi	Juara I Lomba Kelompok Dasa Wisma Berprestasi
8	Lomba Tertib Administrasi PKK	Ketua TP.PKK Kota Bukittinggi	Provinsi	Juara II Lomba Tertib Administrasi PKK
9	Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja	Ketua TP.PKK Kota Bukittinggi	Provinsi	Juara II Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja
10	Lomba UP2K PKK	Ketua TP.PKK Kota Bukittinggi	Provinsi	Juara III Lomba UP2K PKK
11	Lomba HATINYA PKK	Ketua TP.PKK Kota Bukittinggi	Provinsi	Harapan I Lomba HATINYA PKK
12	Penilaian IVA Test	Ketua TP.PKK Kota Bukittinggi	Provinsi	Juara I Penilaian IVA Test

Gambar 3.10

Piagam Penghargaan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia kepada Kota Bukittinggi





MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 189 TAHUN 2020

TENTANG

TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2020 DAN 15 FINALIS  
KELOMPOK KHUSUS KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan penghargaan pengembangan inovasi pelayanan publik kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah berkenaan dengan pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 dan 15 Finalis Kelompok Khusus Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

-2-

- 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2020 DAN 15 FINALIS KELOMPOK KHUSUS KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 dan 15 Finalis Kelompok Khusus Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Urutan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 dan 15 Finalis Kelompok Khusus Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 disusun berdasarkan abjad instansi dan tidak menggambarkan peringkat.

-3-

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Juli 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



LAHJO KUMOLO

-16-

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	KATEGORI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KELOMPOK
86	Pemerintah Kota Bukittinggi	Sekolah Keluarga	Pendidikan	Dinas P3APKB	Umum
87	Pemerintah Kota Denpasar	MAYA SI TEKMAS (Manajemen Layanan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (ATS) Berbasis Teknologi dan Masyarakat	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Umum
88	Pemerintah Kota Gorontalo	Tanda Aman Calon Pengantin (TANCAP NIKAH) Menuju Generasi Unggul	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Umum
89	Pemerintah Kota Jambi	BANGKIT BERDAYA (Bangun Kelurahan Secara Intensif dan Terpadu Yang Berazaskan Swadaya)	Pemberdayaan Masyarakat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Umum
90	Pemerintah Kota Magelang	INOBEL I-STEM/STEAM	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Umum
91	Pemerintah Kota Makassar	Siswa Bebas Asap Rokok (SI BASO)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Umum
92	Pemerintah Kota Malang	SEPASAR PEDAS (Sekolah Pasar Pedagang Cerdas)	Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Umum
93	Pemerintah Kota Mojokerto	GAYATRI (Gerbang Layanan Informasi Terpadu dan Terintegrasi)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Umum
94	Pemerintah Kota Padang	Ayo Ceting (Cegah <i>Stunting</i> )	Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Andalas	Umum

### Pelaksanaan Kuliah Umum Sekolah Keluarga Kota Bukittinggi



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2020. Laporan ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan (9) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai.

Untuk pencapaian kinerja sasaran Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi, masih banyak hal yang perlu dibenahi dan dimaksimalkan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya Penguatan Kelembagaan PUG, Kualitas Hidup, Peran Perempuan dan Keluarga dalam Pembangunan

Indikator Kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan perlu menjamin kesetaraan dan keadilan dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan melalui 7 prasyarat Pengarusutamaan Gender.

b. Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapat layanan komprehensif

Laporan kasus kekerasan terhadap perempuan memperlihatkan penurunan dari 3 tahun terakhir hal ini mengindikasikan pemahaman masyarakat terhadap kasus KDRT sudah semakin baik sehingga ada warga siaga yang menjadi pelapor dan pelopor kasus KDRT di lingkungan masing-masing. Hal ini efektif menurunkan korban KDRT.

c. **Indek Kualitas Keluarga**

Dari 5 (lima) Dimensi, 15 variabel dan 24 indikator (Permen PPPA no 6 tahun 2013 tentang Indikator ketahanan keluarga) yang masih menjadi tugas berat kita antara lain :

1. Dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga; untuk variable landasan legalitas, keutuhan keluarga dan kemitraan Gender.
2. Dimensi Ketahanan ekonomi untuk variable; pendapatan keluarga, pembiayaan pendidikan anak dan jaminan keuangan keluarga.
3. Dimensi ketahanan sosial psikologis untuk variable keharmonisan keluarga
4. Dimensi ketahanan sosial budaya untuk variabel kepedulian sosial

d. **Tingkat Capaian Anugerah Prahita Eka Praya (APE)**

Pada tahun 2020 tingkat capaian APE dapat dipertahankan ditahap Utama yang mengindikasikan 7 prasyarat Pengarusutamaan gender (komitmen, kebijakan dan program, kelembagaan PUG, Sumber daya, data terpilah, tool dan jejaring) sudah memiliki definisi yang sama dan integrasi pelaksanaan program. Hal ini terlihat di seluruh SKPD sudah memiliki anggaran responsive Gender yang dilengkapi dengan GAP dan GBS.

Sasaran 2 Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan  
Perlindungan Khusus Anak

Indikator Kinerja sasaran 2 adalah sebagai berikut :

a. **Tingkat Capaian Kota Layak Anak berdasarkan Kategori**

Pada tahun 2020 Penilaian Kota Layak Anak tidak dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Karena adanya pandemic covid 19 yang melanda Indonesi khususnya bahkan dunia. Namun pada tahun 2019 Kota Bukittinggi telah berhasil mencapai prediket madya, meningkat dari posisi pratama ditahun sebelumnya, namun pencapaian prediket madya belumlah membuat kita puas, karena tingkat madya mengindikasikan pemerintah kota Bukittinggi baru mampu melaksanakan indikator Kota Layak Anak sebanyak 40 %. Setelah di evaluasi dari 5 klaster indikator Kota Layak Anak, data dan dokumentasi yang paling minim adalah dari klaster 3, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dan Klaster 4 Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Hal lain yang berpengaruh besar adalah :

- a. Masih adanya iklan rokok
- b. Taman Terbuka, belum berstandar ramah anak

Capaian Kota Layak Anak, adalah evaluasi kerja lintas SKPD, karena itu perlu komitmen bersama untuk melaksanakannya

- b. Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapat layanan komprehensif

Laporan kasus Kekerasan terhadap anak, memperlihatkan angka yang menurun, hal ini disebabkan oleh pola asuh dirumah tangga yang sudah semakin baik, dan semakin tingginya kepedulian lingkungan, disisi lain kampanye Bersama Lindungi Anak sudah maksimal dilakukan dan standar Kota Layak Anak semakin dipahami dan menjadi acuan kerja. Setiap kasus yang dilaporkan ke Dinas P3APPKB bisa ditangani dan dilayani secara komprehensif.

Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Program Keluarga Berencana

Indikator Kinerja sasaran 3 adalah sebagai berikut :

- a. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)

Dari data yang ada, Pemakaian alat dan obat kontrasepsi sudah baik, walaupun untuk jenis Medis Operasi Pria, Kota Bukittinggi masih lemah, sedangkan untuk metoda kontrasepsi Jangka Panjang, belum pula maksimal karena adanya Perda No 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang mewajibkan masyarakat membayar pelayanan . Selain itu pembayaran jasa medis oleh BPJS yang tidak lancar, menyebabkan motivasi medis menjadi menurun

- b. ASFR

Secara data ASFR Kota Bukittinggi sudah menurun namun dari segi capaian angka masih mengindikasikan tingginya perkawinan anak, beberapa factor yang mempengaruhi adalah :

1. Bukittinggi merupakan Kota tujuan Wisata, Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan yang menyebabkan remaja dari luar daerah cukup berkontribusi terhadap capaian kinerja ASFR.
2. Edukasi kesehatan reproduksi kepada remaja perlu ditingkatkan terutama di PIK R jalur pendidikan dan jalur Masyarakat
3. Perlunya pelibatan remaja diberbagai kegiatan positif
4. Perlunya kerjasama Pemerintah, Orangtua, Sekolah dan lingkungan

## 5. Perlunya anggaran yang memadai

Sasaran 1 Terwujudnya Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan  
Pembangunan Pengendalian Penduduk

Indikator Kinerja sasaran 4 adalah sebagai berikut :

## a. Total Fertility Rate (TFR)

Capaian TFR di posisi 2,55, artinya pasangan usia subur di Kota Bukittinggi memiliki anak 2 – 3 orang selama usia reproduksinya. Sepanjang angka ini tidak bergerak melewati angka 2,7 TFR Bukittinggi masih relative aman, namun upaya menekan TFR mencapai 2,01 tetap menjadi kinerja utama.

Dengan Demikian secara target kinerja Dinas P3APPKB telah berhasil dengan baik namun dikarenakan berbagai kendala yang ada, kedepan perlu ditingkatkan dukungan anggaran, dukungan SDM dan dukungan Komitmen, agar sasaran ditingkat Kota dapat tercapai

Demikian LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bukittinggi

Bukittinggi, Februari 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kota Bukittinggi,



TATI YASMARNI, SE MM  
NIP. 19630629 198302 2001